

AKUNTANSI HIJAU:

Konsep, Implementasi dan
Dampaknya Pada Perusahaan Modern

Penulis:

Arnadi Chairunnas | Aina Zahra Parinduri |
Robith Hudaya | Fenny Marietza | Stefani Lily Indarto



AKUNTANSI HIJAU: KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN DAMPAKNYA PADA PERUSAHAAN MODERN

**Arnadi Chairunnas
Aina Zahra Parinduri
Robith Hudaya
Fenny Marietza
Stefani Lily Indarto**



GET PRESS INDONESIA

**AKUNTANSI HIJAU:
KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN DAMPAKNYA PADA PERUSAHAAN
MODERN**

Penulis :

Arnadi Chairunnas
Aina Zahra Parinduri
Robith Hudaya
Fenny Marietza
Stefani Lily Indarto

ISBN : 978-634-255-355-8

Editor : Diana Purnama Sari, SE., ME.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd.

PENERBIT : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat
website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Akuntansi Hijau: Konsep, Implementasi, dan Dampaknya pada Perusahaan Modern* ini dapat diselesaikan. Isi buku ini mencakup pembahasan tentang konsep dan landasan akuntansi hijau, komponen dan teknik akuntansi hijau, pengaruh akuntansi hijau terhadap kinerja keuangan perusahaan, strategi implementasi dan penerapan akuntansi hijau, dan akuntansi hijau berbasis etika bisnis. Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi dan dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi semua pembaca.

Padang, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 KONSEP DAN LANDASAN AKUNTANSI HIJAU.....	1
1.1 Memahami Konsep Dasar Lingkungan dan Akuntansi Hijau.....	2
1.1.1 Akuntansi Hijau Lingkungan Makro	3
1.1.2 Akuntansi Hijau Lingkungan Mikro	6
1.2 Evolusi Akuntansi Hijau (<i>Green Accounting</i>).....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Hijau (<i>Green Accounting</i>)	9
1.4 Landasan Teoritis Akuntansi Hijau (<i>Green Accounting</i>)	10
DAFTAR PUSTAKA	12
BAB 2 KOMPONEN DAN TEKNIK AKUNTANSI HIJAU.....	15
2.1 Komponen dalam Akuntansi Hijau	18
2.1.1 Biaya Lingkungan (<i>Enviromental Cost</i>).....	18
2.1.2 Laporan Biaya Lingkungan (dalam Ribuan Rupiah)	22
2.1.3 Aset dan Liabilitas Lingkungan.....	23
2.1.4 Pengungkapan Lingkungan dalam Laporan Keuangan.....	24
2.1.5 Indikator Kinerja Lingkungan (<i>Environmental Performance Indicators</i>).....	25
2.1.6 Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>)	28
2.2 Teknik dalam Akuntansi Hijau	30
2.2.1 <i>Enviromental Cost Accounting</i> (ECA)	30
2.2.2 <i>Full Cost Accounting</i> (FCA).....	33
2.2.3 <i>Life Cycle Costing</i> (LCC)	34
2.2.4 <i>Material Flow Cost Accounting</i> (MFCA).....	35
2.2.5 <i>Triple Bottom Line Reporting</i> (TBLR)	37
2.2.6 <i>Carbon Accounting</i>	38
DAFTAR PUSTAKA	40
BAB 3 PENGARUH AKUNTANSI HIJAU TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN	41
3.1 Kinerja Keuangan Perusahaan: Konsep dan Indikator	44
3.1.1 Definisi Kinerja Keuangan	44

3.1.2 Indikator Kinerja Keuangan.....	45
3.2 Pengaruh Akuntansi Hijau terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.....	59
3.2.1 Peningkatan Efisiensi Biaya dan Profitabilitas.....	60
3.2.2 Penurunan Risiko Keuangan dan Biaya Modal.....	61
3.2.3 Peningkatan Nilai Perusahaan dan Daya Tarik Investor	63
3.2.4 Penguatan Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Jangka Panjang	64
3.2.5 Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Bisnis	66
DAFTAR PUSTAKA	68
BAB 4 STRATEGI IMPLEMENTASI DAN PENERAPAN AKUNTANSI HIJAU	73
4.1 Konsep dan Landasan Akuntansi Hijau	75
4.2 Regulasi, Standar, dan Kebijakan Pendukung.....	77
4.2.1 Standar Internasional: IFRS <i>Sustainability Disclosure Standards</i> (IFRS S1 & S2).....	77
4.2.1 Standar Nasional: PSAK terkait Lingkungan, PERMEN, dan Kebijakan Pemerintah Indonesia.....	78
4.2.3 Agenda ESG (<i>Environmental, Social, Governance</i>) dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>)	79
4.2.4 Keterkaitan Kebijakan Pajak, Lingkungan, dan Akuntansi Hijau.....	80
4.3 Kerangka Konseptual Implementasi Akuntansi Hijau	81
4.3.1 Dimensi Input, Process, Output, Outcome dalam Akuntansi Hijau.....	81
4.3.2 Integrasi Akuntansi Hijau dalam Sistem Akuntansi Manajemen dan Keuangan	82
4.3.3 Model Integratif: Triple Bottom Line Reporting (<i>Profit, People, Planet</i>).....	83
4.3.4 Kerangka Pengukuran dan Pelaporan Dampak Lingkungan	84
4.4 Strategi Implementasi di Level Operasional.....	85
4.4.1 Komitmen Manajemen dan Kepemimpinan Hijau	85
4.4.2 Pembentukan <i>Green Accounting Policy Framework</i> ..	86
4.4.3 Integrasi Akuntansi Hijau dalam Proses Bisnis dan Rantai Nilai	87
4.4.4 Pengembangan Kapasitas SDM Akuntansi Berbasis <i>Sustainability</i>	87
4.4.5 Sistem Pelaporan dan Audit Lingkungan.....	88

4.4.6 Penggunaan Teknologi Hijau dan Digitalisasi dalam Akuntansi.....	88
4.5 Pendekatan Strategis Penerapan.....	89
4.5.1 <i>Top-Down Approach</i> : Kebijakan, Regulasi, dan Insentif Pemerintah.....	89
4.5.2 Bottom-Up Approach: Inisiatif Internal dan Budaya Organisasi Hijau.....	90
4.5.3 Sinergi Akademisi, Bisnis dan Pemerintah (<i>Triple Helix</i>) dalam Penerapan.....	91
4.5.4 Strategi Komunikasi dan Pelibatan Stakeholder	92
4.5.5 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi	92
4.6 Studi Kasus Penerapan Akuntansi Hijau	93
4.6.1 Implementasi Akuntansi Hijau di Perusahaan Pertambangan	93
4.6.2 Praktik Sustainability Reporting di Sektor Perbankan	94
4.6.3 UMKM dan Strategi Green Accounting Berbasis Komunitas	95
4.6.4 Analisis Perbandingan dan <i>Best Practices</i>	96
DAFTAR PUSTAKA	98
BAB 5 AKUNTANSI HIJAU BERBASIS ETIKA BISNIS	103
5.1 Konsep Akuntansi Hijau.....	107
5.2 Etika Bisnis dan Keberlanjutan	108
5.3 Integrasi Akuntansi Hijau dan Etika.....	110
5.4 Penerapan Akuntansi Hijau	112
5.5 Pelaporan Keberlanjutan.....	114
5.6 Tantangan dan Masa Depan	116
DAFTAR PUSTAKA	118
INDEKS	121
GLOSARIUM	123
BIODATA PENULIS	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ilustrasi Akuntansi Hijau Lingkungan Makro	4
Gambar 1. 2 Konsep TBL.....	8
Gambar 2. 1 Penerapan <i>Triple Bottom Line</i>	37

BAB 1

KONSEP DAN LANDASAN AKUNTANSI HIJAU

Perkembangan ekonomi global yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan alam. Model akuntansi tradisional, yang sebagian besar berfokus pada kinerja finansial dan laba bersih, sering kali gagal mencerminkan biaya lingkungan (eksternalitas negatif) yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Akuntansi Hijau (*Green Accounting*), atau akuntansi hijau, muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan dimensi ekologis ke dalam sistem pelaporan dan pengambilan keputusan keuangan.

Akuntansi Hijau bukan sekadar tren, melainkan sebuah landasan baru yang mengakui bahwa kelestarian lingkungan adalah prasyarat bagi kelangsungan bisnis jangka panjang. Bab ini akan menguraikan konsep dasar, evolusi, tujuan, dan landasan teoritis yang mendasari Akuntansi Hijau, menjadikannya fondasi pemahaman bagi bab-bab selanjutnya. Bab ini bertujuan untuk menyajikan kerangka konseptual akuntansi hijau yang komprehensif. penulis akan menyelami fondasi teoritis, mengidentifikasi komponen-komponen utama, membahas tantangan pengukuran dan pelaporan, serta melihat bagaimana akuntansi hijau dapat diimplementasikan dalam praktik. Isu lingkungan menjadi sebuah isu yang sangat trending saat ini, berkaitan dengan berbagai aktivitas perusahaan yang jika tidak diatur

sedemikian rupa, akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Sebagai contoh, berbagai bencana alam yang terjadi di Aceh dan berbagai wilayah di Indonesia menjadi bukti nyata, bahwa isu lingkungan menjadi pedang bermata dua yang harus dikelola dengan tepat. Pada akhirnya, penulis berharap kerangka ini dapat menjadi panduan bagi praktisi, akademisi, dan pembuat regulasi (regulator) dalam mengembangkan sistem akuntansi yang responsif terhadap tantangan keberlanjutan.

1.1 Memahami Konsep Dasar Lingkungan dan Akuntansi Hijau

Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur merupakan industri yang kegiatan utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Aktivitas perusahaan manufaktur tidak lepas dari pemanfaatan dan pengolahan sumber daya yang tersedia untuk memproduksi sebuah produk yang akan didistribusikan kepada para konsumennya. Tingkatan persaingan antar perusahaan yang besar, mendorong perusahaan untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan tidak kalah dalam hal kompetisi (Saputra, 2020). Sebagai konsekuensi, makin tinggi pula implikasi adanya limbah maupun polusi akibat berbagai aktivitas produksi yang dilakukan sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan dan pengurangan kualitas lingkungan hidup yang ada.

Perusahaan di era *society* (5.0) menghadapi berbagai tantangan yang tidak sedikit dalam proses sinkronisasi praktik bisnis yang sehat dan memiliki kepedulian dalam aspek alam. Peningkatan kesadaran masyarakat pada pentingnya isu keberlanjutan menjadi salah satu pemicu dan berdampak pada pengurangan dampak negatif terhadap alam. Peningkatan kesadaran konsumen akan isu-isu lingkungan, membuat perusahaan harus mampu beradaptasi dengan pengintegrasian

praktik berkelanjutan pada aspek pemasaran mereka, termasuk dalam peningkatan produk dan komunikasi pemasaran (Kinasih, 2023). Sebagai kesimpulan, perusahaan akhirnya mulai menghitung aspek lingkungan dalam aktivitas mereka, untuk pemenuhan tujuan sosial, dan juga untuk menjaga tujuan jangka panjang mereka. Salah satu pendekatan yang dikenal dalam konteks ini adalah penerapan akuntansi hijau, yang bertujuan untuk pengukuran dan pelaporan konsekuensi yang terjadi di lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan atau institusi.

Akuntansi Hijau adalah disiplin akuntansi yang secara sistematis mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan melaporkan biaya dan manfaat lingkungan yang relevan dari kegiatan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi dan lingkungan suatu entitas. Secara umum, ruang lingkup Akuntansi Hijau mencakup dua aspek utama:

1.1.1 Akuntansi Hijau Lingkungan Makro

Akuntansi Hijau Lingkungan Makro berfokus pada tingkat negara atau regional, mengintegrasikan data lingkungan ke dalam Sistem Akuntansi Nasional (SAN), seperti Produk Domestik Bruto (PDB) Hijau. Tujuannya adalah untuk mengukur kekayaan sumber daya alam dan dampak lingkungan pada tingkat ekonomi nasional.



Gambar 1. 1 Ilustrasi Akuntansi Hijau Lingkungan Makro

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa Akuntansi Hijau Lingkungan Makro ibarat kita mencoba melihat gambaran besar ekonomi suatu negara, tapi bukan cuma dari angka-angka keuntungan atau kerugian biasa. Ini lebih kayak kita menanyakan: "Oke, negara kita maju, tapi apa harga atau konsekuensi yang harus kita bayar ke alam? Pohon-pohon jadi berkurang? Sungai jadi tercemar?"

Akuntansi hijau lingkungan makro ini adalah cara untuk menghitung nilai sumber daya alam dan lingkungan yang seringkali tidak terlihat dalam laporan ekonomi konvensional. Bayangkan, ketika kita menebang hutan untuk membangun gedung, secara ekonomi itu terlihat sebagai kemajuan. Tapi, Akuntansi hijau lingkungan makro ini akan bilang, "Tunggu dulu, hutan itu punya nilai ekologis, dia menyerap karbon, rumah bagi banyak hewan, dan mencegah banjir. Kalau hilang, ada kerugian besar yang tidak dihitung."

Tujuan utamanya adalah supaya pemerintah dan masyarakat bisa mengambil keputusan yang lebih bijak, yang tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tapi juga keberlanjutan lingkungan untuk masa depan anak cucu. Ini bukan cuma soal berapa uang yang dihasilkan, tapi juga berapa banyak kualitas lingkungan yang dipertahankan atau bahkan bisa ditingkatkan.

Sebagai contoh, di beberapa negara maju seperti Norwegia, mereka sudah mengintegrasikan akuntansi hijau ke dalam sistem statistik nasional mereka. Mereka menghitung nilai sumber daya mineral, hutan, dan air sebagai bagian dari kekayaan nasional. Kinerja keberlanjutan Norwegia menonjol sebagai contoh di antara negara-negara OECD, didorong oleh penggunaan tenaga air yang kuat dan komitmen yang mendalam terhadap energi terbarukan (Shmelev, 2025). Tenaga air menyumbang sebagian besar listrik Norwegia, menghasilkan energi yang terbarukan yang sangat tinggi sebesar 57%, jauh melampaui rata-rata negara OECD dan secara signifikan mengurangi emisi CO₂ per kapita menjadi hanya 7,52 ton, hampir setengah dari Amerika Serikat. Selain itu, Norwegia telah menunjukkan kemajuan yang spektakuler dalam adopsi kendaraan listrik (EV), menjadi pemimpin global dalam penetrasi EV karena insentif pemerintah yang kuat, investasi infrastruktur, dan komitmen masyarakat terhadap dekarbonisasi.

Sebagai kesimpulan, akuntansi hijau ini ingin kita melihat ekonomi dengan kacamata yang lebih luas, lebih hijau, dan lebih memiliki konsekuensi positif pada planet ini. Ini bukan cuma soal nilai moneter, tetapi juga soal keberlanjutan kehidupan pada bumi yang kita tinggali.

1.1.2 Akuntansi Hijau Lingkungan Mikro

Akuntansi hijau lingkungan pada tingkat mikro merujuk pada penerapan konsep, metode, dan prosedur akuntansi hijau dalam entitas bisnis individual, seperti perusahaan atau unit usaha tertentu. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengungkapkan informasi biaya serta kinerja lingkungan yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan (Schaltegger & Burritt, 2000). Informasi ini menjadi dasar bagi manajemen untuk menilai sejauh mana aktivitas perusahaan berdampak pada lingkungan serta bagaimana biaya lingkungan dapat dikelola dan dikurangi secara efisien.

Pada level mikro, akuntansi hijau tidak hanya mendokumentasikan biaya lingkungan tradisional, seperti biaya pengolahan limbah dan investasi peralatan ramah lingkungan, tetapi juga biaya tersembunyi, biaya administratif, dan biaya yang dapat dicegah terkait dampak lingkungan (UN Division for Sustainable Development, 2001). Dengan demikian, akuntansi hijau membantu perusahaan untuk mengenali biaya yang sebelumnya tidak tampak dalam sistem akuntansi konvensional. Hasilnya adalah peningkatan transparansi dan akurasi dalam pengambilan keputusan manajerial.

Selain itu, akuntansi hijau mikro berperan penting dalam mendukung praktik manajemen lingkungan strategis. Informasi terkait konsumsi energi, emisi, penggunaan air, dan potensi risiko lingkungan disajikan dalam bentuk laporan internal maupun eksternal untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan (Gray, Bebbington, & Walters, 2014). Pengungkapan tersebut juga menjadi dasar bagi pemangku kepentingan—seperti regulator, investor, dan masyarakat—untuk menilai komitmen keberlanjutan perusahaan. Dengan meningkatnya tuntutan

transparansi, akuntansi hijau mikro berfungsi sebagai alat utama untuk memadukan aspek ekonomi dan ekologis ke dalam sistem pelaporan perusahaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan "Akuntansi Hijau adalah pengakuan bahwa nilai ekonomi tidak dapat dipisahkan dari modal alam. Kegagalan untuk mencatat biaya degradasi lingkungan adalah bentuk distorsi informasi finansial" (Elkington, J., 1997).

1.2 Evolusi Akuntansi Hijau (*Green Accounting*)

Evolusi Akuntansi Hijau (*Green Accounting*) merupakan respons progresif terhadap peningkatan kesadaran lingkungan global, dimulai secara fundamental pada tahun 1970-an dengan munculnya Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (APS) yang mengintegrasikan isu sosial dan lingkungan ke dalam pelaporan korporat. Perkembangan ini dipercepat pada akhir 1980-an dengan adopsi konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) melalui Laporan Brundtland, yang menuntut adanya pengukuran yang lebih spesifik mengenai dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan.

Puncaknya terjadi pada era 1990-an dengan munculnya konsep *Triple Bottom Line* (TBL) oleh John Elkington, yang menekankan pentingnya pelaporan kinerja yang mencakup aspek *People, Planet, and Profit*, mendorong integrasi dimensi ekologis secara sistematis. Dalam dua dekade terakhir, evolusi Akuntansi Hijau berfokus pada standarisasi dan integrasi formal melalui kerangka kerja global seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan *Integrated Reporting*, mengubah praktik ini dari kegiatan sukarela menjadi bagian strategis dari manajemen risiko dan pelaporan wajib di banyak yurisdiksi.



Gambar 1. 2 Konsep TBL

Sumber: Dalibozhko (2018)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, dapat dilihat terdapat tiga dimensi pada konsep TBL, yakni orang, planet, dan keuntungan. Tiga dimensi ini saling bersinergi dan menciptakan keberlanjutan. Selanjutnya jika melihat di Indonesia, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara telah mulai *concern* pada isu tentang lingkungan. Bukti nyata bisa dilihat salah satunya pada penerbitan Standar Pengungkapan Keberlanjutan yang merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang konvergen dengan IFRS *Sustainability Disclosure Standards* yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan IAI. Standar ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2027.

1.3 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Hijau (*Green Accounting*)

Tujuan utama penerapan Akuntansi Hijau adalah untuk memberikan gambaran kinerja perusahaan yang holistik dan komprehensif, tidak hanya terbatas pada hasil finansial, namun juga mencakup dampak dan ketergantungan pada lingkungan alam. Secara internal, tujuan ini diwujudkan melalui penyediaan data biaya lingkungan yang akurat kepada manajemen, memungkinkan identifikasi inefisiensi operasional, peluang penghematan biaya melalui pengurangan limbah, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis dan ramah lingkungan. Penerapan *green accounting* memberikan banyak manfaat bagi perusahaan (Sari, 2023), antara lain:

1. **Peningkatan Keberlanjutan.** Perusahaan akan sangat terbantu dalam hal pengidentifikasian area-area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan.
2. **Pengurangan Risiko.** Hal ini dapat memiliki kemungkinan perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan yang akan memiliki efek negatif pada bisnis.
3. **Peningkatan Reputasi.** Hal ini dimaknai memberikan citra yang positif di mata customer, investor, dan masyarakat luas.
4. **Inovasi Produk dan Proses.** Manfaat berikutnya yaitu memacu perusahaan untuk pengembangan produk dan proses produksi yang lebih ramah dengan lingkungan.
5. **Keunggulan Kompetitif.** Hal yang dapat menjadi ciri khas sekaligus pembeda perusahaan dari pesaing dan membuka peluang bisnis baru yaitu keunggulan kompetitif ini.

Sementara itu, manfaat lain secara eksternal dari Akuntansi Hijau mencakup peningkatan transparansi dan

kredibilitas di mata investor dan kreditor, yang kini semakin mempertimbangkan risiko lingkungan (seperti perubahan iklim) dalam keputusan investasi mereka. Selain itu, praktik ini membantu perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang semakin ketat dan memperkuat legitimasi sosial mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra merek dan memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang.

1.4 Landasan Teoritis Akuntansi Hijau (*Green Accounting*)

Akuntansi Hijau didukung oleh tiga landasan teoritis utama yang menjelaskan dorongan perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengungkapkan informasi lingkungan. Pertama, **Teori Pemangku Kepentingan** menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya mengelola hubungan dengan semua pihak yang berkepentingan termasuk lingkungan, masyarakat, dan regulator menjadikan kinerja lingkungan yang baik sebagai prasyarat operasional.

Kedua, **Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)** berargumen bahwa perusahaan beroperasi di bawah "kontrak sosial" dan harus memastikan bahwa operasinya dianggap sah oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan informasi lingkungan yang transparan menjadi alat untuk menjembatani kesenjangan antara praktik korporat dan ekspektasi sosial yang semakin tinggi terhadap tanggung jawab ekologis.

Ketiga, **Teori Sinyal (*Signaling Theory*)** menjelaskan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan superior akan menggunakan Akuntansi Hijau untuk mengirimkan sinyal positif kepada pasar keuangan, mengurangi asimetri informasi dan berpotensi menurunkan biaya modal karena investor merasa lebih yakin terhadap prospek dan manajemen risiko entitas tersebut. Terdapat banyak teori lain yang mendukung pengungkapan informasi lingkungan, dan tentunya bisa dieksplor lebih jauh kedepannya.

1.5 Soal Latihan

Berikut ini beberapa soal isian yang bertujuan menguji pemahaman pembaca pada materi yang dipaparkan.

1. Jelaskan bagaimana Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (APS) pada tahun 1970-an menjadi fondasi bagi munculnya Akuntansi Hijau (*Green Accounting*)? Diskusikan perbedaan mendasar antara fokus pelaporan keuangan tradisional dan Akuntansi Hijau dalam kaitannya dengan biaya dan kinerja lingkungan!
2. Konsep Triple Bottom Line (TBL) oleh John Elkington (People, Planet, Profit) dianggap sebagai pendorong signifikan dalam evolusi Akuntansi Hijau. Analisis bagaimana TBL mengubah cara perusahaan melaporkan kinerja mereka!
3. Jelaskan tujuan dan manfaat akuntansi hijau secara umum!
4. Jelaskan tiga landasan teoritis yang mendukung integrasi dan pengungkapan informasi lingkungan!
5. Berikan satu contoh implementasi akuntansi hijau di perusahaan yang ada di Indonesia!

DAFTAR PUSTAKA

- Aryoso, H., & Santi, F. (2023). MILENIAL DAN INVESTASI BERKELANJUTAN: MENGHINDARI JEBAKAN GREENWASHING. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(04), 1175-1184.
- Chandra, J. A. C., & Sacipto, R. (2022). Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 138-146.
- Dalibozhko, Anastasiia & Krakovetskaya, Inna. (2018). Youth entrepreneurial projects for the sustainable development of global community: evidence from Enactus program. *SHS Web of Conferences*. 57. 01009. 10.1051/shsconf/20185701009.
- Dorfleitner, G., Halbritter, G. and Nguyen, M. (2015), "Measuring the level and risk of corporate responsibility – An empirical comparison of different ESG rating approaches", *Journal of Asset Management*, Vol. 16 No. 7, pp. 450-466.
- Dowling, J. dan J. Pfeffer. 1975. "Organizational Legitimacy, Social Values and Organizational Behavior". *Pacific Sociological Review*, 18.
- Elkington, J 1998, 'Cannibals with forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Businesses, Gabriola Island, BC Canada: New Society Publishers.
- Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. In *Strategic Management: A Stakeholder Approach*.<https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675>
- <https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/insights/tiga-komponen-penting-dari->

investasi-berkelanjutan/ Diakses 27 November 2023,
Pukul 10.00 WIB

- Gray, R., Bebbington, J., & Walters, D. (2014). *Accounting for the environment* (3rd ed.). London: Paul Chapman Publishing.
- Saputra, M. F. M. (2020). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengungkapan Lingkungan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 5(2), 123-138.
- Sari, K. K., & Kusuma, D. A. (2023). Implementing Green Accounting to Enhance Corporate Sustainability Performance. *Journal of Environmental Economics and Management*, 47(2), 211-223
- Schaltegger, S., & Burritt, R. (2000). *Contemporary environmental accounting: Issues, concepts and practice*. Sheffield: Greenleaf Publishing.
- Shmelev, S. E. (2025). Comparative Multidimensional Assessment of Progress Towards Sustainability at the Macro Scale: The Cases of 12 OECD Countries, China, and Brazil. *Sustainability*, 17(17), 7772. <https://doi.org/10.3390/su17177772>
- Spence, Michael. 1973. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3. (Aug., 1973), pp. 355-374.
- United Nations Division for Sustainable Development. (2001). *Environmental management accounting procedures and principles*. New York: United Nations.

BAB 2

KOMPONEN DAN TEKNIK AKUNTANSI HIJAU

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah global seperti perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas sumber daya alam telah mendapat perhatian yang lebih besar. Diyakini bahwa aktivitas bisnis dan industri berkontribusi secara signifikan terhadap masalah lingkungan. Akibatnya, perusahaan diharuskan untuk menjalankan operasi mereka sehingga mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkannya. UNCTAD (2021).

Green accounting atau akuntansi hijau, adalah metode akuntansi yang mengintegrasikan elemen lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Metode ini mencakup mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan biaya serta keuntungan lingkungan yang dihasilkan oleh operasi bisnis. Schaltegger et al. (2022). *Green accounting*, juga dikenal sebagai akuntansi hijau, adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menemukan, mengukur, dan melaporkan biaya lingkungan yang terkait dengan aktivitas bisnis, termasuk jejak karbon. (Aliyyah Fitriyani & Musa Said Sungkar, 2024). Mengumpulkan, menganalisis, memperkirakan, dan membuat laporan tentang data lingkungan dan finansial disebut akuntansi hijau. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak dan biaya lingkungan. (Cohen dan Robbins 2011).

Konsep ini telah berkembang sejak tahun 1970-an. Prinsip akuntansi internasional, termasuk akuntansi lingkungan, dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Internasional (IASC) pada tahun 1990-an. Prinsip-prinsip audit lingkungan juga dibuat oleh AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*). Tujuan akuntansi lingkungan adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja operasional perusahaan yang berfokus pada perlindungan dan kepedulian lingkungan dengan cara menemukan, mengumpulkan, menghitung, dan menganalisis biaya lingkungan, membuat pelaporan internal dan menggunakan informasi tentang biaya lingkungan, dan menyediakan biaya lain yang terkait sehingga perusahaan tidak dapat mengolah sumber daya secara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Dengan kata lain, cara suatu bisnis dapat menerapkan akuntansi hijau dan menjadi praktik yang harus diterapkan oleh semua bisnis. Astuti, N. (2012).

Bisnis dapat meningkatkan transparansi dalam menjelaskan biaya dan manfaat lingkungan dengan menggunakan akuntansi hijau. Hayaah (2023). Akuntansi hijau, juga dikenal sebagai *green accounting*, adalah pendekatan akuntansi yang menggabungkan biaya dan keuntungan lingkungan dalam laporan keuangan bisnis untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan pelestarian alam. Ide ini muncul sebagai tanggapan terhadap bagaimana aktivitas ekonomi memengaruhi lingkungan, dengan mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengungkapkan biaya lingkungan seperti mencegah pencemaran atau pemulihan sumber daya alam.

Tujuan akuntansi hijau adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan biaya lingkungan yang efektif dan terbuka. Metode ini memberikan informasi kepada pemangku kepentingan pengambilan keputusan, mengurangi risiko lingkungan, dan meningkatkan kinerja berkelanjutan.

Akuntansi hijau mendorong investasi dalam teknologi ramah lingkungan serta keunggulan kompetitif melalui pengakuan biaya, perhitungan jejak karbon, dan analisis input-output lingkungan. Konsep ini semakin populer di Indonesia untuk sektor yang memanfaatkan sumber daya alam dan mendukung sistem ekonomi berkarbon rendah, Riadi (2022).

Kriteria dan syarat utama informasi *green accounting*. Lako (2018).

1. Terintegrasi dan komprehensif berarti bahwa informasi akuntansi dalam pelaporan akuntansi hijau harus memasukkan semua informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan dalam satu pelaporan.
2. Relevan, yaitu informasi akuntansi harus relevan dengan kebutuhan pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan, dan harus tepat waktu dan memiliki nilai umpan balik dan prediktif.
3. Reliabel, yaitu informasi akuntansi harus dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pemakai untuk membuat keputusan ekonomi dan nonekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, data akuntansi yang disajikan harus valid, akurat, dan netral.
4. Transparan berarti informasi akuntansi terintegrasi harus disajikan secara jujur, akuntabel, dan transparan agar tidak menyesatkan orang yang menilai, menilai, dan membuat keputusan ekonomi dan non-ekonomi.
5. Keterbandingan berarti informasi akuntansi disajikan secara konsisten dari waktu ke waktu dan secara akuntabel.

2.1 Komponen dalam Akuntansi Hijau

2.1.1 Biaya Lingkungan (*Enviromental Cost*)

Biaya lingkungan dapat berupa biaya internal maupun eksternal yang terkait dengan kerusakan atau pelestarian lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan bisnis yang memengaruhi lingkungan dan mencakup biaya yang diperlukan untuk mengelola, meminimalkan, atau memulihkan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis.

Biaya lingkungan tidak hanya dianggap sebagai beban dalam akuntansi, tetapi juga sebagai investasi dalam pengurangan dampak lingkungan. Biaya ini termasuk biaya pencegahan (investasi untuk mengurangi dampak lingkungan), biaya deteksi (pengawasan dan pemantauan lingkungan), biaya kegagalan internal (kerusakan lingkungan yang dapat diperbaiki secara internal), dan biaya kegagalan eksternal (kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada pihak luar).

Dengan menggunakan akuntansi biaya lingkungan, perusahaan dapat membuat pilihan bisnis yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial sambil meningkatkan kinerja ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan akuntansi biaya lingkungan adalah untuk menemukan, mengukur, mengelola, dan melaporkan biaya-biaya tersebut. (Sri Astuti dan Ikhsan 2002).

- Biaya pencegahan

Dalam akuntansi hijau, biaya pencegahan merupakan salah satu komponen utama biaya lingkungan, yang mencakup biaya untuk tindakan yang bertujuan untuk mencegah produksi limbah, sampah, atau polusi yang dapat merusak lingkungan

sebelum dampaknya terjadi. Biaya pencegahan termasuk dalam kategori biaya lingkungan bersama dengan biaya deteksi, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal, di mana pencegahan berfokus pada upaya proaktif untuk memastikan proses produksi tetap ramah lingkungan. (Kartyaningsih Bela, Darwis Said, Syarifuddin Rasyid 2023).

Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya yang timbul dari aktivitas untuk mencegah kotoran dan limbah produksi yang merusak lingkungan. H.Hamidi (2019). Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan hal-hal untuk mencegah limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. (Hansen dan Bowen 2009).

Contoh biaya pencegahan:

- a. biaya reklamasi lahan dan pengolahan limbah untuk mencegah pencemaran air dan tanah.
 - b. investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan, seperti sistem daur ulang air atau filter udara.
 - c. Biaya perencanaan proses produksi bersih, yang mencakup audit dan pengawasan lingkungan teratur.
 - d. Design produk yang ramah lingkungan dan instruksi karyawan untuk praktik berkelanjutan. Hamidi (2019).
- Biaya deteksi
Dalam akuntansi hijau, biaya deteksi termasuk biaya untuk inspeksi, pengujian, dan pemantauan untuk memastikan bahwa produk, proses produksi, dan kegiatan perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku.

Maksudnya adalah upaya reaktif setelah pencegahan untuk menemukan pelanggaran atau

ketidaksesuaian lingkungan yang mungkin secara dini sehingga bisnis dapat memperbaikinya sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut.

Contoh biaya deteksi :

- a. Audit lingkungan, pemantauan kualitas air/udara.
- b. Biaya audit lingkungan dan inspeksi fasilitas produksi.
- c. Pemantaun jejak karbon dan validasi kepatuhan sertifikasi seperti ISO 14001.

Biaya pencegahan dilengkapi dengan verifikasi empiris, meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan, dan meningkatkan transparansi, pengendalian risiko lingkungan, dan pengambilan keputusan berkelanjutan. Selain itu, biaya ini dimasukkan ke dalam laporan keuangan akuntansi hijau untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi biaya kegagalan di masa depan.

- Biaya internal kegagalan

Dalam akuntansi hijau, biaya kegagalan internal adalah biaya yang mencakup pengolahan atau penanganan sampah dan limbah yang dihasilkan oleh bisnis tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Maksudnya adalah biaya reaktif internal yang muncul setelah produksi limbah untuk diurus atau dihilangkan secara mandiri sehingga tidak terpengaruh oleh faktor eksternal seperti pemeliharaan fasilitas pengolahan atau peralatan polusi yang bekerja (almunawarah:2022).

Contoh biaya internal kegagalan:

- a. Limbah.
- b. Biaya daur ulang.
- c. Pengelolaan limbah.

- d. Pengoperasian peralatan pengurang polusi dan pemeliharaan.

Biaya ini dicatat dalam laporan keuangan akuntansi hijau untuk menemukan inefisiensi produksi dan memperbaiki proses. Ini akan mengurangi biaya total lingkungan jangka panjang dan meningkatkan kinerja berkelanjutan. Metode ini melengkapi biaya pencegahan dan deteksi dengan menekankan koreksi internal, meningkatkan transparansi, dan mematuhi undang-undang lingkungan.

- **Biaya eksternal kegagalan**

Dalam akuntansi hijau, biaya kegagalan eksternal adalah komponen biaya lingkungan yang mencakup pengeluaran untuk tindakan setelah sampah atau limbah dilepaskan ke lingkungan luar, menyebabkan kerusakan atau dampak buruk pada masyarakat dan ekosistem sekitar. Maksudnya adalah biaya reaktif paling akhir yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pengendalian lingkungan. Biaya ini dapat dibagi menjadi biaya yang terjadi (dibayar oleh perusahaan, seperti pembersihan) dan biaya yang tidak terjadi (dibayar oleh pihak luar, seperti biaya sosial atau kesehatan masyarakat). (weruin:2026)

Contoh biaya eksternal kegagalan:

- a. Konpensasi pencemaran.
- b. Sanksi hukum.
- c. Biaya Kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara atau limbah.

Biaya ini dimasukkan ke dalam laporan keuangan untuk mengukur dampak eksternal, meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan, dan mendorong pengurangan melalui pencegahan dini. Metode ini juga

melengkapi elemen lain dengan penekanan pada pengurangan risiko jangka panjang dan kepatuhan global.

2.1.2 Laporan Biaya Lingkungan untuk Periode 31 Desember 2023(dalam Ribuan Rupiah)

Biaya Lingkungan	Jumlah		% dari total biaya
Biaya Pencegahan:			
Pelatihan pegawai	30.000		
Desain produk	10.000		
Pemilihan peralatan	5.000	45.000	27,95%
Biaya Deteksi:			
pemeriksaan proses	12.000		
pengembangan ukuran produk	19.000	31.000	19,25%
Biaya kegagalan internal:			
Pengoprasian peralatan	10.000		
pemeliharaan peralatan	10.000	20.000	12,42%
Biaya Kegagalan External			
Pembersihan danau	20.000		
Retorasi tanah	25.000		
Penyelesaian klaim kerusakan	20.000	65.000	27%
Total Biaya Lingkungan		161.000	100%

Sumber: Buku cost management, Blocher, Stout & Cokins

2.1.3 Aset dan Liabilitas Lingkungan

- Aset

Dalam akuntansi hijau, aset lingkungan mencakup sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh bisnis atau entitas yang berkaitan dengan lingkungan dan keberlanjutan. Ini termasuk aset fisik seperti peralatan pengendalian polusi, teknologi ramah lingkungan, dan sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan. Aset lingkungan juga dapat mencakup aset tidak berwujud seperti hak paten teknologi hijau atau sertifikasi lingkungan.

Contoh aset lingkungan :

- a. Aset lingkungan seperti teknologi dan peralatan pengelolaan limbah atau pengurangan emisi.
- b. Sumber daya alam yang digunakan dengan cara yang ramah lingkungan.
- c. Investasi dalam program CSR dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- d. Aset tak berwujud yang mendukung kinerja lingkungan, seperti sertifikat ISO 14001 atau paten teknologi hijau.

- Liabilitas lingkungan

Dalam akuntansi hijau, liabilitas lingkungan mencakup tanggung jawab keuangan atau terus-menerus yang terkait dengan tindakan perusahaan yang memengaruhi lingkungan, seperti pembayaran untuk perbaikan situs tercemar, restorasi ekosistem, atau komitmen CSR lingkungan jangka pendek dan panjang. Maksudnya adalah untuk mengakui estimasi kewajiban masa depan yang mungkin dalam neraca keuangan untuk mencerminkan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan atau pelestarian sumber daya. Ini termasuk liabilitas

sosial yang berkelanjutan akibat undang-undang, litigasi, atau janji publik perusahaan.

Contoh liabilitas lingkungan :

- a. Provisi pemulihan lahan setelah penggunaan.
- b. kewajiban terus menerus untuk denda pemerintah atau ganti rugi publik karena polusi.
- c. Komitmen jangka panjang untuk konservasi atau pengelolaan limbah SDA.

Liabilitas ini dianggap meningkatkan transparansi laporan keuangan, membantu mengelola risiko lingkungan, dan mendorong pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih berkelanjutan. Metode ini menambahkan perspektif kewajiban ke aset lingkungan, yang memastikan nilai kini yang akurat dari dampak operasional di neraca.

2.1.4 Pengungkapan Lingkungan dalam Laporan Keuangan

Dalam akuntansi hijau, catatan atas laporan keuangan (CALK) harus mengungkapkan kebijakan lingkungan (seperti komitmen CSR dan prosedur pengelolaan dampak lingkungan), biaya lingkungan (seperti pengakuan dan pengukuran biaya pencegahan, deteksi, pelanggaran internal dan eksternal), dan estimasi kewajiban (seperti memberikan remediasi atau denda di masa depan). Dimaksudkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kelengkapan informasi lingkungan sesuai dengan prinsip materialitas dan verifikasi, sehingga pemangku kepentingan dapat melihat kinerja keberlanjutan perusahaan secara menyeluruh dalam laporan tahunan atau keberlanjutan. (www.liputan6.com).

Laporan keberlanjutan berbasis akuntansi hijau berarti perusahaan menyajikan informasi tentang dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola. Laporan yang dibuat sesuai dengan standar internasional seperti GRI (*Global Reporting Initiative*) dan IFRS *Sustainability Disclosure Standards* bertujuan untuk memberikan gambaran transparan dan menyeluruh kepada pemangku kepentingan mengenai bagaimana perusahaan mengelola risiko dan penerimaan. (Angelina, M., & Nursasi, E. (2021).

2.1.5 Indikator Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Indicators*)

Pada akuntansi hijau, indikator kinerja lingkungan (EPI) adalah metrik kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengukur, mengawasi, dan melaporkan seberapa baik operasi perusahaan mengelola dampak lingkungannya, seperti tingkat emisi, penggunaan energi, atau pengelolaan limbah. Untuk mengevaluasi pencapaian target keberlanjutan, membantu proses pengambilan keputusan, dan memastikan akuntabilitas terhadap regulasi dan pemangku kepentingan, laporan keuangan hijau dibuat dengan data yang objektif.

Pada akuntansi hijau, intensitas emisi (CO₂ per unit produk) adalah ukuran yang menunjukkan jumlah karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau proses produksi untuk setiap unit produk yang diproduksi.

Ini menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi lingkungan dan dampak karbon dari kegiatan produksi, dan membantu bisnis memantau dan mengelola jejak karbonnya dengan lebih baik.

Sebagai contoh, jika sebuah pabrik memproduksi 10.000 unit produk dan menghasilkan 100 ton CO₂, intensitas emisinya adalah 0,01 ton CO₂ per unit produk. Sebagai dasar untuk menetapkan tujuan pengurangan emisi, pengukuran ini memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerja lingkungan antar waktu atau antar perusahaan sejenis. Akuntansi hijau menggunakan intensitas emisi sebagai alat untuk memasukkan elemen lingkungan ke dalam laporan keberlanjutan dan pengambilan keputusan manajemen. Ini dapat mendorong praktik produksi yang lebih ramah lingkungan serta meningkatkan transparansi bagi pemangku kepentingan.

Dalam akuntansi hijau, efisiensi energi mengacu pada pengukuran dan pelaporan jumlah energi yang digunakan oleh suatu bisnis sehingga perusahaan dapat memaksimalkan output produk atau layanan sambil mengurangi limbah energi, yang pada gilirannya mengurangi biaya operasional dan emisi karbon. Konsep ini menjadi bagian dari efisiensi lingkungan, di mana akuntansi hijau mengidentifikasi, mengukur, dan mengalokasikan biaya energi untuk mendorong investasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Indikator efisiensi energi :

- a. Rasio konsumsi energi per unit produksi (misalnya Kwh per ton produk).
- b. Persentase pengurangan konsumsi energi tahun ke tahun melalui audit dan optimalisasi proses.
- c. Kontribusi energi terbarukan terhadap total kebutuhan operasional.

Laporan keuangan hijau menggunakan efisiensi energi untuk menunjukkan penghematan biaya lingkungan dan peningkatan kinerja ekonomi. Ini juga membantu keputusan manajemen seperti ROA yang lebih tinggi dan transparansi kepada stakeholder. Metode ini

mendorong perusahaan untuk mengadopsi model rendah karbon, yang menguntungkan ekonomi dan lingkungan(Tuti &Ersi:2024).

Penggunaan air dan bahan baku dalam akuntansi hijau berarti mengukur, mencatat, dan melaporkan penggunaan sumber daya alam tersebut sebagai bagian dari indikator kinerja lingkungan. Ini dilakukan untuk menilai efisiensi input produksi dan dampak keberlanjutan operasional perusahaan. Ide ini mengintegrasikan biaya terkait penggunaan air dan bahan baku (seperti akuntansi air) ke dalam laporan keuangan hijau, sehingga menemukan pemborosan, mengurangi biaya lingkungan, dan mengidentifikasi sumber daya yang terbuang (Ray:2024).

Indikator pengukuran utama :

- a. Penggunaan air mencakup rasio volume air per unit produksi (m^3/ton produk), tingkat kehilangan air dalam distribusi, dan efisiensi daur ulang.
- b. Konsumsi per unit output, persentase bahan ramah lingkungan, dan jejak sumber daya adalah bahan baku.

Pengukuran ini mendorong praktik berkelanjutan seperti teknologi penghematan air industri dan pengurangan limbah bahan baku. Mereka juga memungkinkan perusahaan untuk memantau efisiensi sumber daya, menghitung biaya tersembunyi seperti optimalisasi bahan baku atau penghematan air hujan, dan melaporkan transparan dalam laporan keberlanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas stakeholder. www.liputan6.com.

Dalam akuntansi hijau, persentase bahan yang dapat didaur ulang adalah indikator kinerja lingkungan yang mengukur jumlah bahan baku atau input produksi yang berasal dari bahan yang dapat didaur ulang dibandingkan dengan jumlah bahan yang digunakan. Ini biasanya

ditunjukkan sebagai rasio (EN2 dalam standar GRI). Maksudnya adalah untuk menilai efisiensi sumber daya dan komitmen keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada bahan baku murni. Ini akan menghasilkan penghematan biaya lingkungan dan pengurangan limbah dalam laporan keuangan hijau. Bambang Arianto dan Bakti Handayani (2025).

Cara pengukuran :

- a. Rumus: $(\text{Berat/Volume material daur ulang} \div \text{Total material yang digunakan}) \times 100\%$

Contoh: Jika perusahaan menggunakan 100ton material dengan 30ton dari daur ulang, persentasenya 30%.

Untuk memantau kemajuan keefektifan lingkungan, membantu pengambilan keputusan tentang investasi dalam teknologi daur ulang, dan meningkatkan transparansi bagi stakeholder, indikator ini dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutan. Peningkatan persentase ini berkontribusi pada pengurangan biaya lingkungan dan peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Muhammad Adi Bagus, Novi Riani, Farida Ekawati (2023).

2.1.6 Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada akuntansi hijau adalah dokumen berkala yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi terkait operasional berkelanjutan (*triple bottom line*). Laporan ini biasanya dibuat sesuai dengan standar GRI atau IFRS *Sustainability*. Dimaksudkan untuk memberikan transparansi menyeluruh kepada pemangku kepentingan tentang efek hijau seperti efisiensi sumber daya, emisi, dan limbah. Ini dilakukan dengan

laporan keuangan untuk mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan ramah lingkungan.

Komponen utamanya :

- a. Kebijakan dan pendekatan keberlanjutan yang mencakup tujuan pengurangan emisi dan pengelolaan limbah.
- b. Intensitas karbon dioksida, efisiensi energi, dan persentase daur ulang adalah indikator kinerja lingkungan.
- c. Dampak sosial-ekonomi dan tata kelola (ESG), berdasarkan penilaian independent.

Laporan ini menambah neraca hijau dengan data non-keuangan yang dapat diverifikasi, meningkatkan efisiensi biaya lingkungan, meningkatkan reputasi, dan memenuhi peraturan Indonesia seperti UU PT No. 40/2007. Metode ini mengaitkan kinerja ramah lingkungan dengan nilai perusahaan dalam jangka panjang.(www.tuv.com)

Dalam akuntansi hijau, konsep Triple Bottom Line (TBL: *Profit-People-Planet*) menyajikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan pada laporan keberlanjutan. Dalam laporan ini, perusahaan melaporkan kinerjanya secara seimbang untuk mencapai keberlanjutan holistik dengan mengimbangi manfaat keuangan (*profit*), efek sosial (*people*), dan planet (*earth*). Memasukkan metrik non-keuangan seperti efisiensi sumber daya, kesejahteraan masyarakat, dan emisi karbon ke dalam laporan keberlanjutan memungkinkan pihak berwenang untuk menilai secara menyeluruh kontribusi perusahaan terhadap ekonomi hijau (Mulyati & Nur:2023)

- a. Ekonomi (Pendapatan): Menghitung return on assets (ROA), mengurangi biaya lingkungan, dan menghitung nilai ekonomi dari tindakan hijau.

- b. Sosial (Orang-orang): Pengaruh pada komunitas, karyawan, dan CSR, seperti pelatihan atau kesejahteraan masyarakat sekitar.
- c. Lingkungan (Planet): Pengurangan limbah, efisiensi energi, dan jejak karbon adalah indikatornya.

Pendekatan TBL mendorong transformasi bisnis menuju keseimbangan tiga pilar untuk pembangunan berkelanjutan, mendukung transparansi ESG, mengurangi risiko regulasi, dan meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang melalui verifikasi independen sesuai GRI. M Syarifuddin (2024).

Komponen Laporan keberlanjutan akuntansi hijau berfungsi sebagai alat transparan untuk menyampaikan kinerja *Triple Bottom Line* (ekonomi, sosial, dan lingkungan) kepada investor, masyarakat, regulator, dan mitra, menciptakan kepercayaan dan membuka diskusi di kedua belah pihak. Mengubah data hijau seperti efisiensi sumber daya atau emisi menjadi cerita strategis yang memenuhi peraturan (seperti POJK No.51/2017), membantu stakeholder dalam pengambilan keputusan, dan mendorong komitmen berkelanjutan melalui laporan resmi dan media digital. Dhiba, S. F., & Koan, D. F. (2024).

2.2 Teknik dalam Akuntansi Hijau

2.2.1 *Enviromental Cost Accounting (ECA)*

Teknik akuntansi lingkungan utama, *environmental cost accounting* (ECA), mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan semua biaya lingkungan yang terkait dengan operasi bisnis, termasuk biaya tersembunyi, pencegahan, deteksi, dan kegagalan. Untuk mengurangi pemborosan sumber daya, mengurangi risiko regulasi, dan mendukung efisiensi lingkungan,

tujuannya adalah untuk menyediakan data akurat untuk pengambilan keputusan manajemen yang mengintegrasikan dampak lingkungan ke laporan keuangan konvensional.

Komponen ECA utama :

- a. Pengukuran biaya lingkungan tersembunyi serta biaya konvensional, seperti limbah
- b. Biaya dikategorikan berdasarkan pencegahan, deteksi, dan kegagalan internal dan eksternal.
- c. Untuk menangkap biaya eksternal seperti kerusakan ekosistem, integrasi *full cost accounting*.

Sesuai dengan definisi PBB tentang ekonomi berkelanjutan, ECA membangun fondasi untuk akuntansi hijau di tingkat nasional dengan memungkinkan transparansi dalam catatan laporan keuangan dan laporan berkelanjutan, memungkinkan audit lingkungan, dan mendorong inovasi seperti teknologi rendah emisi untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang (www.binus.ac.id)

Akuntansi biaya lingkungan (ECA) yang berfokus pada pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan pengukuran biaya lingkungan berarti proses sistematis untuk menemukan, mengelompokkan, dan menghitung semua biaya yang terkait dengan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis.

- Pengidentifikasian mencakup semua tindakan dan komponen yang menyebabkan biaya lingkungan, seperti mencegah limbah, melacak kualitas lingkungan, dan menangani limbah dan pencemaran.
- Pengklasifikasian adalah proses mengelompokkan biaya sesuai dengan kategori utamanya. Kategori utama biaya termasuk biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal.

- Pengukuran melibatkan menentukan secara akurat nilai atau biaya dari setiap kategori agar dapat dilaporkan dan dianalisis dengan benar.

Tujuan utamanya adalah untuk membuat laporan biaya lingkungan yang transparan dan lengkap sehingga perusahaan dapat mengendalikan dan mengurangi biaya tersebut secara efisien, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pelaporan akuntansi hijau yang ramah lingkungan.

Dalam akuntansi hijau, biaya lingkungan dipisahkan dari biaya produksi biasa. Teknik akuntansi biaya lingkungan, atau ECA, secara eksplisit mengkategorikan dan mengalokasikan biaya yang berkaitan dengan dampak lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan pencegahan polusi, ke akun yang berbeda daripada dicampur dengan biaya umum produksi. Dimaksudkan untuk mengurangi inefisiensi dan mendukung proses pengambilan keputusan berkelanjutan dengan memungkinkan manajemen menemukan biaya tersembunyi, melacak tren, dan mengendalikan pengeluaran lingkungan secara khusus (Rofi'ah & Desi:2022)

Manfaat pemisahan

- Transparansi: Biaya lingkungan dilaporkan secara terpisah dari biaya CSR atau operasional, sehingga lebih mudah untuk menganalisis dampak terhadap profitabilitas.
- Pengendalian: Mengoptimalkan proses ramah lingkungan membantu mencapai target pengurangan biaya.
- Pelaporan: Mendukung pengungkapan dalam laporan keberlanjutan dan catatan laporan keuangan.

Ini digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan dengan mengidentifikasi aktivitas lingkungan, mengatur kode akun khusus, dan menggunakan analisis regresi untuk mengukur dampak terhadap *return on assets* (ROA). Metode ini mengutamakan efisiensi lingkungan, membedakan akuntansi hijau konvensional.

Sesuai dengan definisi PBB tentang ekonomi berkelanjutan, ECA membangun fondasi untuk akuntansi hijau di tingkat nasional dengan memungkinkan transparansi dalam catatan laporan keuangan dan laporan berkelanjutan, memungkinkan audit lingkungan, dan mendorong inovasi seperti teknologi rendah emisi untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang.

2.2.2 Full Cost Accounting (FCA)

Full Cost Accounting (FCA) adalah metode akuntansi hijau yang memperluas pengakuan biaya dengan menyertakan biaya internal dan tidak langsung serta biaya eksternal yang sering diabaikan dalam akuntansi konvensional. Maksudnya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang biaya yang ditanggung oleh aktivitas bisnis terhadap lingkungan sehingga manajemen dapat mengalokasikan biaya dengan tepat, menemukan inefisiensi, dan membuat keputusan yang mencerminkan tanggung jawab keberlanjutan secara finansial.

Komponen FCA :

- a. Biaya internal terkait dengan pencegahan, deteksi, dan kegagalan internal.
- b. Biaya eksternal termasuk perbaikan lingkungan, denda, atau hilangnya nilai ekonomi ekosistem.

- c. Menggabungkan analisis input-output untuk memantau aliran sumber daya (wulandari dkk:2019)

Dalam akuntansi biaya penuh (FCA) untuk produksi pupuk, biaya produksi tidak hanya mencakup bahan baku langsung seperti unsur kimia, tenaga kerja, dan overhead pabrik, tetapi juga memasukkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi, seperti kerusakan tanah dan pencemaran air akibat residu pupuk. Artinya, biaya lingkungan seperti kerusakan kualitas tanah dan air karena limbah residu dihitung sebagai bagian dari biaya produksi sehingga mencerminkan biaya penuh produksi pupuk. Ini mendorong perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan secara lebih bertanggung jawab dan transparan dalam laporan keuangannya.

Dengan memasukkan biaya tersebut, bisnis dapat melihat seberapa banyak sumber daya yang digunakan, baik secara finansial maupun ekologis, dan dapat melakukan perbaikan untuk membuatnya lebih hemat sumber daya dan berkelanjutan.

FCA, selaras dengan prinsip akuntabilitas PBB, mendukung pelaporan transparan dalam laporan keberlanjutan, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan efisiensi melalui pengurangan biaya tersembunyi. Ini melengkapi ECA dengan pandangan luas tentang ekonomi hijau.

2.2.3 Life Cycle Costing (LCC)

Salah satu metode akuntansi hijau yang dikenal sebagai *Life Cycle Costing* (LCC) menghitung biaya keseluruhan suatu produk, aset, atau proses sepanjang siklus hidupnya, mulai dari perencanaan dan pengadaan, operasi dan pemeliharaan, hingga pembuangan atau daur ulang. Dimaksudkan untuk memberikan perspektif yang

lebih luas untuk memasukkan biaya lingkungan jangka panjang, seperti pengelolaan limbah, emisi karbon, dan restorasi, ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis, sehingga mereka dapat memilih pilihan yang paling ekonomis dan berkelanjutan daripada hanya biaya awal.

Tahapan LCC :

- a. Pengadaan: Biaya bahan baku yang ramah lingkungan dan desain yang ramah lingkungan.
- b. Operasi: Konsumsi energi, pemeliharaan, dan biaya berkelanjutan lingkungan.
- c. Pembuangan: Biaya untuk perbaikan, daur ulang, atau biaya eksternal pada akhir siklus.

Mengukur biaya sepanjang siklus hidup produk, dari bahan baku → produksi → distribusi → penggunaan → pembuangan.

Digunakan untuk analisis keberlanjutan produk. Analisis dampak lingkungan penuh (*Life Cycle Assessment*) dalam laporan keberlanjutan mendukung akuntansi hijau LCC, mengurangi risiko tersembunyi, meningkatkan nilai aset, dan mengoptimalkan biaya kepemilikan secara keseluruhan. Teknologi ini mendorong kemajuan seperti gedung hijau atau produk rendah karbon yang menghasilkan keuntungan finansial dalam jangka panjang. (Pelupessy:2025)

2.2.4 Material Flow Cost Accounting (MFCA)

Akuntansi aliran material (MFCA) adalah metode akuntansi hijau yang mengukur aliran material moneter dan fisik selama proses produksi. Tujuannya adalah untuk menemukan dan mengurangi pemborosan material, energi, dan limbah yang tidak menghasilkan nilai tambah. Targetnya adalah mengubah biaya kehilangan, seperti limbah, menjadi data yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya,

mengurangi biaya, dan mengurangi dampak lingkungan. Ini akan sesuai dengan ekonomi sirkular dan produktivitas hijau.

Komponen utama MFCA

- a. *Cost of Material In-Flow*: Biaya untuk material yang dimasukkan dan energi yang dimasukkan ke dalam proses.
- b. Harga Produk Positif: Biaya bahan yang menjadi produk jadi bernilai.
- c. *Loss Cost*: Harga barang yang dibuang dalam bentuk limbah, scrap, atau evaporasi.

Akuntansi aliran material (MFCA) adalah metode akuntansi hijau yang mengukur aliran material moneter dan fisik selama proses produksi. Tujuannya adalah untuk menemukan dan mengurangi pemborosan material, energi, dan limbah yang tidak menghasilkan nilai tambah. Dimaksudkan untuk mengubah biaya kehilangan, seperti limbah, menjadi data yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi biaya, dan mengurangi dampak lingkungan. Ini akan sesuai dengan ekonomi sirkular dan produktivitas hijau.

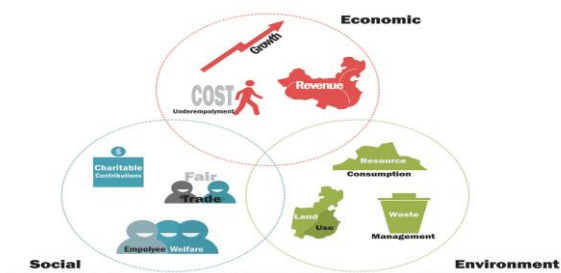
Prosedur utama MFCA :

- a. Pemetaan Alur adalah cara untuk menunjukkan diagram aliran material dari input ke output (produk plus limbah).
- b. Kuantifikasi Biaya: Empat jenis biaya—materi, energi, sistem, dan penanganan limbah—dialokasikan ke produk positif dan negatif.
- c. Analisis & Perbaikan: Dengan menggunakan rekayasa proses atau desain produk, hitung persentase biaya kehilangan untuk target pengurangan(ISO 14051).

MFCA meningkatkan transparansi biaya lingkungan, membantu keputusan seperti perencanaan produksi dan rantai pasokan, dan menghubungkan penghematan material dengan profitabilitas. Teknik ini mendorong produktivitas hijau di pabrik dan selaras dengan standar ISO 14051 dan SDG.

2.2.5 Triple Bottom Line Reporting (TBLR)

Dalam akuntansi hijau, Triple Bottom Line Reporting (TBLR) adalah metode pelaporan yang mengukur dan menyajikan kinerja perusahaan melalui tiga dimensi utama: ekonomi (laba), sosial (orang), dan lingkungan (bumi). Ini berbeda dari pelaporan keuangan konvensional yang hanya berfokus pada laba. Maksudnya adalah untuk memberikan kerangka yang luas untuk transparansi keberlanjutan. Dalam laporan keberlanjutan, perusahaan melaporkan metrik seperti *return on assets* (ROA) (ekonomi), kesejahteraan karyawan dan masyarakat (sosial), dan pengurangan emisi dan limbah (lingkungan). Ini memungkinkan pihak berwenang untuk menilai dampak jangka panjang secara proporsional.



Gambar 2. 1 Penerapan *Triple Bottom Line*

Sumber: Perpektif-WorPress.com

Dimensi TBLR :

- a. Profit (Ekonomi): Ukuran keuangan seperti pendapatan, biaya lingkungan, dan efisiensi operasional.
- b. Orang (Sosial): Pengukuran hak asasi manusia, pendidikan karyawan, dan kontribusi masyarakat.
- c. Planet (Lingkungan): Informasi tentang emisi karbon, manajemen limbah, dan konservasi sumber daya.

Melalui standar verifikasi independen (GRI), TBLR mendorong ekonomi hijau dan meningkatkan reputasi dan akses modal berkelanjutan. Selain itu, TBLR mendukung integrasi data non-keuangan dengan laporan keuangan. Metode ini mengubah paradigma bisnis dari fokus pada keuntungan ke arah keseimbangan tiga pilar untuk pertumbuhan berkelanjutan.

2.2.6 Carbon Accounting

Akuntansi karbon adalah teknik akuntansi hijau yang berfokus pada pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh bisnis atau organisasi. Teknik ini membantu bisnis menghitung jejak karbon (*footprint*) secara terstruktur, termasuk emisi langsung dari operasional dan emisi tidak langsung dari rantai pasokan serta penggunaan energi (li.putan6.com).

Ini bertujuan untuk memberi perusahaan pemahaman kuantitatif tentang dampak karbon mereka sehingga mereka dapat mengelola dan mengurangnya sebagai bagian dari upaya keberlanjutan dan kepatuhan regulasi. Ini juga akan meningkatkan transparansi kepada pemangku kepentingan dan memenuhi standar pelaporan lingkungan internasional.

Komponen utama *carbon accounting* :

- a. pengukuran emisi CO₂ dan GRK lainnya dalam ton CO₂e.
- b. Jenis emisi dapat dikategorikan menjadi langsung (bagian 1), tidak langsung (bagian 2), dan emisi lainnya di rantai pasokan (bagian 3).
- c. Pelaporan dalam laporan keberlanjutan dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan.

Perusahaan dapat menggunakan akuntansi karbon untuk menemukan sumber emisi karbon, menetapkan tujuan pengurangan emisi, dan meningkatkan efisiensi energi dan operasi ramah lingkungan. Pada akhirnya, ini akan mendorong ekonomi hijau dan tanggung jawab sosial perusahaan (Dewi, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.kompasiana.com/nurfahmadi/6188d5bbffe7b54f643ef505/green-accounting-pengertian-fungsi-penerapan-akuntansi-lingkungan>
- <https://journal.scimadly.com/index.php/jpmb/article/download/177/132/745>
- <https://www.kajianpustaka.com/2022/07/green-accounting.html>
- https://www.academia.edu/41922559/Pengertian_Akuntansi_Biaya_Lingkungan
- <https://journal.yrpioku.com/index.php/msej/article/download/2115/1342/16413>
- <https://web.iaiglobal.or.id/assets/materi/Sertifikasi/CA/modul/aml/files/basic-html/page85.html>
- accounting-sebagai-instrumen-pengendalian-biaya-lingkungan-pada-industri-manufaktur
- <https://journal.yrpioku.com/index.php/msej/article/download/2115/1342/16413>
- https://etheses.iainkediri.ac.id/9918/3/934130619_bab2.pdf
- <https://www.ksap.org/sap/akuntansi-hijau/>
- <https://www.liputan6.com/feeds/read/5775019/mengenal-green-accounting-konsep-akuntansi-hijau-untuk-keberlanjutan-bisnis-dan-lingkungan>
- <https://www.ksap.org/sap/akuntansi-hijau/>

BAB 3

PENGARUH AKUNTANSI HIJAU TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan kini menjadi isu krusial yang memengaruhi hampir seluruh aspek ekonomi dan bisnis. Kenaikan suhu global, cuaca ekstrem, dan berbagai ancaman ekologis lainnya mendorong tuntutan terhadap praktik usaha yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah, investor, dan masyarakat semakin menekan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi serta memenuhi harapan konsumen yang kini lebih memilih produk dan layanan berkelanjutan. Kondisi ini mendorong berkembangnya akuntansi hijau sebagai pendekatan untuk mengukur, melaporkan, dan mengendalikan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Akuntansi hijau membantu perusahaan mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai biaya lingkungan dari kegiatan operasional (Maama & Appiah, 2019).

Dorongan penerapan akuntansi hijau muncul dari berbagai faktor, terutama regulasi dan standar pelaporan lingkungan seperti GRI dan SASB, yang menuntut perusahaan mengungkapkan dampak signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial (Pizzi et al., 2024). Permintaan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi juga menjadi insentif bagi perusahaan untuk mengelola risiko dengan lebih baik serta memperoleh akses modal yang lebih murah (Dye et

al., 2021). Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait ketiadaan standar verifikasi yang konsisten, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan investor. Dengan menyediakan informasi lingkungan yang terukur dan andal, akuntansi hijau memungkinkan perusahaan membuat keputusan strategis yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi operasional, serta menghasilkan produk berkelanjutan yang mampu memperkuat daya saing global (Maama & Appiah, 2019).

Hubungan antara akuntansi hijau dan kinerja keuangan perusahaan dapat dipahami melalui beberapa mekanisme utama yang umumnya menunjukkan pengaruh positif, meskipun terdapat tantangan tertentu. Pertama, inisiatif efisiensi energi dan pengurangan limbah mampu menurunkan biaya operasional sehingga meningkatkan margin laba. Temuan Rahmatulloh & Suranta, (2023) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan yang baik berhubungan dengan peningkatan kinerja finansial, yang tercermin dari indikator seperti ROA dan ROE. Namun, transformasi menuju akuntansi hijau sering membutuhkan investasi awal yang besar sehingga dapat menekan kinerja keuangan dalam jangka pendek (Lucia et al., 2020). Selain itu, pengungkapan lingkungan yang kredibel juga dapat memperkuat reputasi perusahaan, menarik lebih banyak pelanggan, dan mendorong diferensiasi produk. Buallay et al., (2020) menemukan bahwa pengungkapan CSR dan informasi lingkungan yang kuat berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan, termasuk ROA dan Tobin's Q, melalui peningkatan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Di sisi lain, penerapan akuntansi hijau juga memberi manfaat melalui akses modal yang lebih besar dan risiko regulatori yang lebih rendah. Penelitian Kurniawan & Rokhim, (2023) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung memperoleh biaya modal lebih rendah karena dinilai memiliki risiko yang lebih kecil. Pencatatan dan pengendalian dampak lingkungan yang baik juga membantu

perusahaan mengurangi potensi denda, litigasi, serta biaya remediasi, sebagaimana dibuktikan oleh López-Toro et al., (2021) yang menemukan bahwa indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, hubungan tersebut tidak selalu konsisten. Beberapa riset melaporkan hasil netral atau negatif, terutama pada tahap awal investasi lingkungan (Lucia et al., 2020), dan penelitian (Deswanto & Siregar, 2018) bahkan menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas akuntansi hijau sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi serta konteks institusional tempat perusahaan beroperasi.

Dari sisi metodologis, untuk menelaah pengaruh akuntansi hijau terhadap kinerja keuangan perlu perhatian pada masalah kausalitas dan endogenitas misalnya perusahaan yang memang sudah berkinerja baik lebih mungkin mengadopsi praktik hijau (reverse causality). Pengukuran variabel juga harus komprehensif. Selain metrik keuangan tradisional (ROA, ROE, margin operasi, Tobin's Q), peneliti dianjurkan mengukur cost of capital, volatilitas laba, dan indikator keberlanjutan operasional seperti intensitas energi per unit output.

Secara praktis, bagi manajer perusahaan akuntansi hijau bukan sekadar kewajiban kepatuhan melainkan alat strategis dimana jika diintegrasikan dengan baik, dapat memperkuat kinerja keuangan jangka panjang melalui efisiensi, inovasi, dan pengelolaan risiko. Bagi pembuat kebijakan dan regulator, mendorong standar pelaporan yang jelas dan mekanisme assurance akan membantu menyelaraskan insentif pasar sehingga manfaat keberlanjutan dapat tercermin dalam penilaian ekonomi.

3.1 Kinerja Keuangan Perusahaan: Konsep dan Indikator

Bab ini membahas konsep dasar kinerja keuangan, kerangka dimensi utama (rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio nilai perusahaan), serta indikator kuantitatif yang umum dipakai untuk mengukurnya. Selain teknik pengukuran dan interpretasi rasio, pembahasan juga menyorot pentingnya kontekstualisasi melalui analisis lintas waktu, benchmarking industri, dan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi dan kejadian non-operasional untuk menghasilkan penilaian yang valid dan berguna bagi pengambil keputusan.

3.1.1 Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran kuantitatif dan kontekstual mengenai kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan keuntungan, mengelola likuiditas dan kewajiban, mengoptimalkan penggunaan aset, dan menghasilkan arus kas yang memadai untuk mendukung operasi, investasi, dan distribusi nilai kepada pemangku kepentingan (pemegang saham, kreditor, dsb.)

Kinerja keuangan memegang peranan sentral bagi perusahaan karena menjadi tolok ukur objektif kemampuan entitas dalam menciptakan nilai ekonomi, menjaga kelangsungan operasi, dan memenuhi kewajiban kepada pemangku kepentingan. Melalui indikator-indikator seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, efisiensi operasi, dan nilai pasar, manajemen memperoleh informasi penting untuk pengambilan keputusan sehari-hari dan strategis misalnya alokasi modal, pengendalian biaya, kebijakan dividen, serta perencanaan investasi dan pembiayaan.

Bagi investor dan kreditor, kinerja keuangan merupakan dasar penilaian risiko dan potensi imbal hasil

yang memengaruhi akses perusahaan ke modal dan biaya modalnya. Bagi regulator dan pemangku kepentingan lain, laporan kinerja menandakan kepatuhan dan transparansi. Selain itu, pemantauan kinerja keuangan yang sistematis membantu mendeteksi kelemahan operasional lebih dini, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mendukung upaya peningkatan berkelanjutan sehingga perusahaan lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Dengan demikian, kinerja keuangan bukan hanya refleksi hasil historis, tetapi juga alat diagnostik dan indikator arah bagi strategi masa depan perusahaan.

3.1.2 Indikator Kinerja Keuangan

Indikator kinerja keuangan utama terdiri dari lima jenis yaitu aktivitas, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan nilai yang masing-masing berfungsi untuk menjelaskan aspek berbeda dari kesehatan dan prospek perusahaan. Indikator aktivitas mengukur efisiensi pemanfaatan aset dan perputaran modal kerja untuk mendukung penjualan. Indikator profitabilitas mengevaluasi kemampuan menghasilkan laba dan margin keuntungan dari operasi. Indikator likuiditas menilai kapasitas memenuhi kewajiban jangka pendek serta kestabilan arus kas operasional. Indikator solvabilitas menyoroti struktur modal dan risiko pembiayaan jangka panjang termasuk kemampuan menanggung beban bunga dan pelunasan utang; sedangkan indikator nilai pasar mencerminkan penilaian investor terhadap prospek pertumbuhan, risiko, dan ekspektasi kinerja masa depan yang tercermin dalam harga saham dan metrik valuasi. Kelima indikator ini saling melengkapi sehingga dapat memberi gambaran menyeluruh dari aspek operasional, keuangan, dan pasar sehingga manajer, investor, dan kreditor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan terukur.

1) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas (*activity ratios*) adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset dan modal kerjanya untuk menghasilkan operasi sehari-hari khususnya pendapatan/penjualan. Rasio ini menilai kecepatan dan efektivitas perputaran komponen neraca (aset tetap, persediaan, piutang, dll.) menjadi penjualan atau kas, sehingga memberi gambaran tentang produktivitas sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Rasio aktivitas penting karena menunjukkan efektivitas manajemen operasi dan penggunaan aset, membantu memprediksi kebutuhan modal kerja dan arus kas jangka pendek, berperan dalam menilai hubungan antara efisiensi operasional dan profitabilitas mendeteksi masalah operasional sedini mungkin, seperti persediaan menumpuk, manajemen piutang yang buruk, atau investasi aset yang tidak produktif. Dengan kata lain, rasio aktivitas adalah indikator operasional yang menjembatani laporan laba-rugi dan neraca untuk menilai kinerja ekonomi sehari-hari perusahaan.

Analisis yang baik tidak hanya melihat angka tunggal, melainkan melihat pula analisis tren lintas waktu untuk melihat perbaikan atau kemunduran, benchmarking terhadap rata-rata industri dan pesaing, menggunakan saldo rata-rata (*average balances*) untuk mencegah distorsi akibat nilai akhir periode, menyesuaikan untuk seasonality dan item non-operasional dan menggabungkan dengan rasio lain untuk interpretasi lainnya.

Contoh rasio aktivitas adalah Total Asset Turnover (TATO). Rasio ini mengukur seberapa efektif total aset perusahaan menghasilkan

penjualan. Rasio ini dirumuskan sebagai (Subramanyam & Wild, 2000: 373):

$$\text{TATO} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$$

Jika nilai TATO tinggi, maka setiap unit aset menghasilkan banyak penjualan (efisiensi pemanfaatan aset). Akan tetapi jika nilai TATO rendah, maka aset kurang produktif; bisa akibat investasi berlebih, aset tidak terpakai, atau penurunan permintaan. Sebagai langkah analisis awal, gunakan penjualan bersih selama 12 bulan dan rata-rata total aset (misal (Aset awal + Aset akhir)/2). Bandingkan dengan perusahaan sejenis dan tren historis. Analisis perubahan TATO bersama margin (misal margin kotor) untuk mengetahui apakah perusahaan bersaing melalui volume atau margin.

Contoh rasio aktivitas berikutnya adalah Inventory Turnover. Rasio ini mengukur berapa kali persediaan dalam periode tertentu dikonversi menjadi penjualan. Rasio ini dirumuskan sebagai (Subramanyam & Wild, 2000: 377):

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$$

Jika nilai Turnover tinggi, maka persediaan cepat bergerak (efisiensi stok), namun jika terlalu tinggi bisa menandakan stok yang terlalu tipis dan risiko stockout. Akan tetapi jika Turnover rendah, maka persediaan menumpuk (risiko usang, *overstocking*) atau permintaan menurun.

2) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan kelompok rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio ini menjadi indikator utama dalam menilai efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham serta mempertahankan keberlanjutan usahanya.

Pentingnya rasio profitabilitas terletak pada fungsinya sebagai alat evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan strategis. Bagi investor, rasio ini menjadi dasar untuk menilai tingkat pengembalian atas investasi yang ditanamkan, sementara bagi manajemen, hasil analisis profitabilitas digunakan untuk menilai efektivitas strategi bisnis dan efisiensi operasional yang diterapkan. Selain itu, bagi pihak kreditor, rasio profitabilitas memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya melalui laba yang diperoleh. Dengan demikian, analisis profitabilitas tidak hanya menggambarkan kondisi laba, tetapi juga mencerminkan kesehatan keuangan dan prospek masa depan perusahaan.

Contoh rasio profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk

menghasilkan keuntungan. Rumus ROA adalah (Subramanyam & Wild, 2000: 371):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sebagai contoh, jika suatu perusahaan memiliki laba bersih sebesar Rp500 juta dan total aset sebesar Rp5 miliar, maka ROA-nya adalah $(500.000.000 / 5.000.000.000) \times 100\% = 10\%$. Artinya, setiap Rp1 aset yang dimiliki mampu menghasilkan laba sebesar Rp0,10. ROA yang tinggi menandakan perusahaan memiliki efisiensi tinggi dalam penggunaan aset, sedangkan ROA yang rendah mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pemanfaatan aset.

Contoh rasio profitabilitas lainnya adalah Net Profit Margin (NPM). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari setiap rupiah penjualan. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang diperoleh. Rumus NPM adalah (Subramanyam & Wild, 2000: 318):

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki laba bersih Rp600 juta dari penjualan bersih Rp6 miliar, maka $\text{NPM} = (600.000.000 / 6.000.000.000) \times 100\% = 10\%$. Artinya, setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba bersih Rp0,10 setelah dikurangi seluruh beban. NPM yang tinggi menunjukkan

efisiensi pengelolaan biaya dan strategi harga yang efektif, sedangkan NPM yang rendah bisa menjadi sinyal adanya beban operasional yang terlalu tinggi atau kebijakan harga yang kurang tepat

Secara keseluruhan, kedua rasio profitabilitas tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari berbagai perspektif: aset (ROA) dan penjualan (NPM). Dalam konteks akuntansi hijau, analisis profitabilitas menjadi penting karena implementasi praktik ramah lingkungan dapat berdampak terhadap biaya operasional dan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, rasio-rasio profitabilitas ini membantu menilai apakah penerapan akuntansi hijau memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan.

3) **Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini penting karena menggambarkan tingkat kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan, terutama kemampuan manajemen dalam mengelola kas dan aset lancar agar dapat menutup utang yang segera jatuh tempo. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual aset tetap atau mencari sumber dana eksternal. Dalam konteks akuntansi hijau, rasio likuiditas juga mencerminkan efisiensi operasional perusahaan dalam mengelola sumber daya

berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas finansialnya.

Contoh rasio likuiditas adalah Current Ratio (CR). Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total aset lancar terhadap total kewajiban lancar perusahaan. Rumusnya adalah (Subramanyam & Wild, 2000: 685):

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Sebagai contoh, jika suatu perusahaan memiliki aset lancar sebesar Rp800.000.000 dan kewajiban lancar sebesar Rp400.000.000, maka current ratio-nya adalah 2,0. Artinya, setiap Rp1 utang jangka pendek dijamin dengan Rp2 aset lancar, menunjukkan likuiditas yang baik. Namun, nilai rasio yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan bahwa perusahaan kurang efisien dalam memanfaatkan aset lancarnya untuk menghasilkan laba, misalnya karena terlalu banyak kas menganggur atau piutang yang belum tertagih.

Contoh rasio likuiditas lainnya adalah Quick Ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas yang lebih ketat dibandingkan current ratio karena tidak memasukkan persediaan sebagai bagian dari aset lancar. Hal ini dikarenakan persediaan dianggap memerlukan waktu lebih lama untuk dicairkan menjadi kas. Rumus quick ratio adalah (Subramanyam & Wild, 2000: 685):

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Sebagai contoh, jika suatu perusahaan memiliki aset lancar Rp800.000.000, persediaan Rp200.000.000, dan kewajiban lancar Rp400.000.000, maka quick ratio-nya adalah 1,5. Artinya, setiap Rp1 kewajiban jangka pendek dapat dijamin oleh Rp1,5 aset likuid yang mudah dicairkan. Rasio ini penting bagi investor dan kreditor untuk menilai apakah perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Dalam praktiknya, quick ratio yang sehat umumnya berada di atas 1,0, menandakan kondisi keuangan yang stabil dan manajemen kas yang efektif

Rasio likuiditas memiliki keterkaitan erat dengan penerapan akuntansi hijau karena keduanya mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Akuntansi hijau menekankan pada pengintegrasian aspek lingkungan dalam sistem pelaporan keuangan, termasuk pengelolaan aset dan kewajiban yang memperhatikan dampak ekologis. Ketika perusahaan menerapkan praktik akuntansi hijau, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, atau penggunaan bahan ramah lingkungan, hal ini dapat berpengaruh pada struktur aset lancar dan kewajiban lancar yang tercermin dalam rasio likuiditas. Misalnya, investasi dalam teknologi ramah lingkungan bisa meningkatkan efisiensi biaya operasional jangka panjang, yang pada gilirannya memperkuat posisi likuiditas perusahaan.

4) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya menggunakan total aset yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan seberapa besar struktur pendanaan perusahaan ditopang oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio solvabilitas menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber pendanaan eksternal. Semakin tinggi rasio solvabilitas, semakin besar risiko keuangan yang dihadapi karena meningkatnya beban bunga dan kewajiban pembayaran pokok utang.

Pentingnya rasio solvabilitas terletak pada kemampuannya memberikan gambaran mengenai stabilitas keuangan dan tingkat risiko jangka panjang perusahaan. Investor, kreditur, dan manajemen menggunakan rasio ini untuk menilai apakah perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk melunasi utangnya tanpa mengorbankan operasional bisnis. Dalam konteks keberlanjutan, solvabilitas juga menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara pembiayaan kegiatan ramah lingkungan dan kemampuan mempertahankan kelangsungan usaha jangka panjang. Perusahaan yang solvabel cenderung lebih mampu mendanai investasi hijau tanpa menimbulkan tekanan keuangan yang berlebihan.

Contoh rasio solvabilitas adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR). Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat leverage dan stabilitas keuangan perusahaan. Rasio ini membantu manajemen, investor, dan kreditur untuk memahami sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Dengan

mengetahui proporsi pendanaan dari utang terhadap total aset, pihak manajemen dapat mengendalikan risiko keuangan dan merencanakan strategi pembiayaan yang lebih efisien. Rumus Debt to Asset Ratio (DAR) adalah (Subramanyam & Wild, 2000: 686):

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sebagai contoh, jika suatu perusahaan memiliki total utang sebesar Rp400 juta dan total aset sebesar Rp1 miliar, maka nilai DAR-nya adalah 40%. Artinya, 40% dari aset perusahaan dibiayai melalui utang, sedangkan sisanya 60% dibiayai melalui modal sendiri. Rasio ini bermanfaat untuk menilai tingkat leverage perusahaan dimana semakin tinggi nilai DAR, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan eksternal, dan semakin tinggi pula risiko keuangan yang dihadapi. Dalam konteks akuntansi hijau, perusahaan dengan tingkat DAR yang moderat cenderung memiliki fleksibilitas finansial lebih besar untuk mengalokasikan dana ke proyek-proyek lingkungan tanpa menambah beban utang

Contoh rasio solvabilitas lainnya adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio ini digunakan untuk perbandingan antara total utang dan total ekuitas perusahaan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman dibandingkan dengan dana yang berasal dari pemilik modal. Rumus *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah (Subramanyam & Wild, 2000: 686):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Sebagai contoh, apabila total utang perusahaan sebesar Rp500 juta dan total ekuitas sebesar Rp1 miliar, maka DER-nya adalah 50%. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal sendiri digunakan untuk menanggung Rp0,5 utang. Semakin rendah DER, semakin kecil risiko keuangan dan semakin kuat posisi perusahaan di mata investor dan kreditor. Dalam konteks akuntansi hijau, DER yang terkendali menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang untuk membiayai kegiatan ramah lingkungan, melainkan mampu memanfaatkan sumber modal internal atau hasil efisiensi dari praktik hijau yang dijalankan.

Akuntansi hijau mendorong transparansi dan tanggung jawab lingkungan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Penerapan prinsip akuntansi hijau dapat mempengaruhi rasio solvabilitas karena praktik ramah lingkungan seringkali membutuhkan investasi jangka panjang dalam teknologi bersih, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Jika investasi tersebut dibiayai dengan utang, maka akan berdampak pada kenaikan rasio DAR dan DER. Namun, dalam jangka panjang, penerapan akuntansi hijau dapat menurunkan risiko keuangan dengan menekan biaya operasional dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor yang peduli terhadap keberlanjutan.

Selain itu, perusahaan dengan struktur modal yang sehat lebih mampu berinvestasi dalam inisiatif hijau tanpa mengorbankan stabilitas keuangannya. Hal ini menunjukkan hubungan yang sinergis antara solvabilitas dan akuntansi hijau. Dengan demikian, rasio solvabilitas menjadi indikator penting dalam

menilai kesiapan perusahaan untuk bertransformasi menuju bisnis berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

5) **Rasio Valuasi Pasar**

Rasio valuasi pasar adalah kelompok rasio keuangan yang digunakan untuk menilai bagaimana pasar menilai kinerja dan prospek perusahaan berdasarkan harga sahamnya. Rasio ini menghubungkan data pasar (seperti harga saham) dengan data akuntansi (seperti laba, nilai buku, atau aset), sehingga mencerminkan persepsi investor terhadap nilai dan potensi pertumbuhan perusahaan. Dengan kata lain, rasio valuasi pasar mengukur seberapa jauh nilai pasar perusahaan mencerminkan nilai fundamentalnya.

Pentingnya rasio valuasi pasar terletak pada kemampuannya untuk memberikan indikasi kepercayaan dan ekspektasi pasar terhadap perusahaan. Investor menggunakan rasio ini untuk menentukan apakah suatu saham dinilai terlalu tinggi (*overvalued*) atau terlalu rendah (*undervalued*) dibandingkan dengan kinerja riil perusahaan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi efektivitas strategi keuangan, kebijakan investasi, serta implementasi program keberlanjutan seperti akuntansi hijau. Ketika praktik hijau diaplikasikan dengan baik, reputasi dan nilai pasar perusahaan cenderung meningkat karena menarik minat investor yang peduli terhadap keberlanjutan.

Contoh rasio valuasi pasar adalah Tobins'q. Rasio ini digunakan untuk menilai efisiensi dan potensi pertumbuhan perusahaan. Rasio ini membandingkan nilai pasar aset perusahaan dengan biaya pengganti (*replacement cost*) dari aset

tersebut. Rumus Tobin's Q secara sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut (Tobin, 1969):

$$\text{Tobins' } q = \frac{\text{Nilai Pasar Ekuitas} + \text{Nilai Pasar Utang}}{\text{Nilai Buku Total Asset}}$$

Nilai Tobin's Q > 1 menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan lebih tinggi dari nilai aset yang dimilikinya, menandakan bahwa perusahaan dinilai efisien dalam mengelola asetnya dan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Sebaliknya, nilai Tobin's Q < 1 menunjukkan bahwa aset perusahaan dinilai pasar lebih rendah dari nilai bukunya, menandakan kurangnya efisiensi atau kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Sebagai contoh, jika nilai pasar ekuitas Rp1,2 triliun, nilai pasar utang Rp0,3 triliun, dan total aset Rp1 triliun, maka Tobin's Q = (1,2 + 0,3) / 1 = 1,5. Ini berarti perusahaan dinilai positif oleh pasar dan dipersepsikan memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

Dalam konteks akuntansi hijau, Tobin's Q mencerminkan bagaimana pasar menghargai upaya perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan. Perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan—seperti efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, atau inovasi ramah lingkungan—sering kali memperoleh penilaian pasar yang lebih tinggi. Hal ini karena investor menilai praktik hijau sebagai strategi jangka panjang yang dapat meningkatkan daya saing, menurunkan risiko hukum dan reputasi, serta memperkuat citra perusahaan.

Contoh rasio valuasi pasar lainnya adalah *Price to Book Value* (PBV). Rasio ini merupakan rasio valuasi pasar yang membandingkan harga pasar saham per lembar dengan nilai buku per saham (book value per share). Rasio ini digunakan untuk menilai apakah harga saham suatu perusahaan sudah mencerminkan nilai sebenarnya dari aset bersih yang dimilikinya. Rumus PBV dapat dirumuskan sebagai (Subramanyam & Wild, 2000: 150):

$$PBV = \frac{\text{Harga Pasar per Saham}}{\text{Nilai Buku per Saham}}$$

Sebagai contoh, jika harga pasar per saham Rp2.000 dan nilai buku per saham Rp1.000, maka $PBV = 2$. Artinya, saham perusahaan tersebut diperdagangkan dua kali lebih tinggi dari nilai bukunya. Nilai PBV yang tinggi menunjukkan bahwa pasar menilai perusahaan secara positif, biasanya karena memiliki prospek laba yang baik, reputasi kuat, atau pengelolaan aset yang efisien. Sebaliknya, PBV rendah bisa mengindikasikan undervaluasi atau adanya tantangan dalam kinerja keuangan perusahaan.

Kegunaan PBV dalam konteks akuntansi hijau adalah sebagai indikator bagaimana pasar menghargai strategi keberlanjutan perusahaan. Jika penerapan akuntansi hijau meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan risiko lingkungan, dan memperkuat citra perusahaan, maka hal tersebut akan tercermin pada peningkatan nilai pasar saham, sehingga rasio PBV meningkat. Dengan demikian, PBV tidak hanya menggambarkan kekayaan bersih perusahaan, tetapi juga mencerminkan nilai tambah

yang dihasilkan dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Rasio valuasi pasar memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntansi hijau, karena keduanya berhubungan dengan persepsi dan nilai perusahaan di mata publik serta investor. Implementasi akuntansi hijau dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan, sehingga memperkuat kepercayaan investor. Hal ini secara langsung dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaan yang tercermin dalam rasio Tobin's Q dan PBV.

Perusahaan yang melaporkan dan menerapkan praktik akuntansi hijau secara konsisten biasanya menunjukkan kinerja keuangan yang lebih stabil dalam jangka panjang, karena efisiensi energi, pengurangan limbah, dan inovasi hijau mengurangi biaya operasional dan risiko lingkungan. Keberlanjutan ini menjadi nilai tambah di mata investor yang semakin memperhatikan environmental, social, and governance (ESG) criteria dalam pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, rasio valuasi pasar bukan hanya menggambarkan kekuatan finansial, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan reputasional dari penerapan akuntansi hijau sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan.

3.2 Pengaruh Akuntansi Hijau terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Akuntansi hijau merupakan pendekatan akuntansi modern yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan

perusahaan. Penerapan akuntansi hijau tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Melalui pengelolaan biaya lingkungan yang efisien, transparansi pengungkapan, dan penerapan praktik bisnis berkelanjutan, perusahaan mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menekan biaya operasional, serta memperkuat citra dan kepercayaan investor. Dengan demikian, akuntansi hijau berperan sebagai strategi keuangan jangka panjang yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mendorong profitabilitas, efisiensi, dan stabilitas keuangan perusahaan

3.2.1 Peningkatan Efisiensi Biaya dan Profitabilitas

Akuntansi hijau memiliki peran penting dalam membantu perusahaan mencapai efisiensi biaya dan profitabilitas. Dengan mencatat secara jelas seluruh biaya lingkungan mulai dari pengelolaan limbah, penggunaan energi, hingga konsumsi air, perusahaan dapat mengidentifikasi area pemborosan yang tidak terlihat dalam laporan keuangan tradisional. Safitri & Sari, (2022) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan di PT Panggung Jaya Indah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi perusahaan dalam mengelola tanggung jawab lingkungannya. Informasi tersebut memungkinkan manajemen menerapkan strategi penghematan, seperti pengurangan limbah dan efisiensi energi, yang pada akhirnya menurunkan biaya operasional.

Dalam skala bisnis yang lebih luas, penerapan akuntansi hijau terbukti berkontribusi pada peningkatan rasio profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Net Profit Margin* (NPM). Bagas et al., (2024) menemukan bahwa manajemen akuntansi hijau di PT Coca Cola Bottling Indonesia mampu mendorong efisiensi biaya

yang berujung pada peningkatan profitabilitas dan kinerja keberlanjutan. Temuan serupa disampaikan oleh Santi et al., (2022) yang menunjukkan bahwa penggunaan Material Flow Cost Accounting dapat membantu perusahaan mengidentifikasi biaya material yang terbuang, sehingga mendorong peningkatan efisiensi dan berdampak positif pada kinerja keuangan.

Lebih dari sekadar efisiensi biaya, akuntansi hijau juga mengubah tanggung jawab lingkungan menjadi peluang ekonomi nyata. (Mubarokah & Setyaningsih, 2024) menegaskan bahwa integrasi biaya lingkungan dalam proses pengambilan keputusan membuat perusahaan tidak hanya mampu memenuhi tanggung jawab sosialnya, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kinerja finansial jangka panjang. Dengan demikian, penerapan akuntansi hijau memberikan manfaat ganda dengan membantu perusahaan mengelola dampak lingkungan serta meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan.

3.2.2 Penurunan Risiko Keuangan dan Biaya Modal

Akuntansi hijau memiliki peran penting dalam menurunkan risiko finansial dan biaya modal perusahaan melalui transparansi pengelolaan risiko lingkungan. Dengan melakukan pengungkapan biaya lingkungan secara sistematis, perusahaan mampu memitigasi potensi denda dan litigasi akibat pelanggaran regulasi lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan transparansi melalui praktik akuntansi hijau dapat memperkuat kepercayaan investor serta lembaga keuangan, yang pada akhirnya membawa perusahaan kepada biaya modal yang lebih rendah (Attig et al., 2024).

Penerapan akuntansi hijau menandakan bahwa perusahaan telah memiliki sistem pengelolaan risiko yang baik, yang menjadi faktor kunci dalam keputusan pendanaan investor yang menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Pengungkapan yang selektif mengenai aspek lingkungan dapat secara signifikan menurunkan biaya utang perusahaan karena meningkatkan persepsi kredibilitas di mata kreditor (Attig et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, perilaku ESG yang positif dapat mengurangi biaya modal bagi perusahaan, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap lingkungan (Zhao et al., 2025).

Lebih lanjut, pengungkapan informasi lingkungan yang berkualitas tinggi tidak hanya mendorong praktik akuntansi yang lebih baik tetapi juga dapat meningkatkan akses perusahaan terhadap pinjaman dan investasi dengan syarat yang lebih menguntungkan. Pengungkapan informasi akuntansi lingkungan berdampak positif terhadap biaya peminjaman dalam perusahaan yang beroperasi di industri yang padat polusi (Chen, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kinerja lingkungan dapat menikmati manfaat finansial yang signifikan.

Akhirnya, penerapan akuntansi hijau dan pengungkapan yang baik dapat meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan dan memberikan perlindungan terhadap fluktuasi jangka panjang. Kualitas CSR yang lebih tinggi terkait dengan rendahnya biaya modal utang, membuktikan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang lebih baik memiliki risiko yang lebih rendah di mata kreditor (Pasko et al., 2024). Dalam konteks ini, akuntansi hijau tidak hanya berfungsi sebagai alat analitis untuk evaluasi kinerja keuangan, tetapi juga

sebagai pendorong menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

3.2.3 Peningkatan Nilai Perusahaan dan Daya Tarik Investor

Akuntansi hijau memainkan peranan penting dalam peningkatan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi keberlanjutan yang transparan. Dengan melaporkan kinerja lingkungan secara terbuka, perusahaan tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan, tetapi juga memberikan sinyal positif mengenai integritas manajemen dan kemampuan mereka dalam mengelola risiko jangka panjang. Penerapan akuntansi hijau dan laporan keberlanjutan dapat meningkatkan kepercayaan pasar serta menarik investor yang semakin peduli akan aspek lingkungan (Sharma & Kumar, 2023).

Pengungkapan tersebut menjadi pertimbangan signifikan bagi investor dalam mengevaluasi nilai intrinsik perusahaan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan laporan keberlanjutan berkorelasi positif dengan metrik valuasi pasar seperti harga saham, rasio *Price to Book Value* (PBV), dan Tobin's Q. Penelitian Buallay, (2019) menjelaskan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pengungkapan ESG dan kinerja keuangan di sektor perbankan Eropa, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu menciptakan nilai tambah melalui integrasi praktik keberlanjutan.

Perusahaan yang aktif dalam akuntansi hijau cenderung lebih menarik bagi investor global dan lembaga keuangan hijau, yang pada gilirannya memperkuat posisi finansial dan reputasi perusahaan di pasar modal. Investasi dalam inovasi keberlanjutan dan laporan ESG secara signifikan memengaruhi kinerja

keuangan perusahaan. Investor berpotensi meningkatkan apresiasi terhadap perusahaan yang berkomitmen pada praktik bisnis berkelanjutan.

Selain itu, regulator dan pemangku kepentingan lainnya semakin mengharuskan perusahaan untuk mematuhi standar keberlanjutan, yang mendorong pengungkapan yang lebih transparan secara keseluruhan (Jørgensen et al., 2021). Dengan demikian, laporan keberlanjutan berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya, sambil memperkuat legitimasi perusahaan di mata publik.

Kinerja akuntansi hijau tidak hanya berfokus pada kepatuhan tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan, memberikan manfaat yang signifikan dalam peningkatan daya tarik investasi serta reputasi korporasi di pasar global (Liou et al., 2023). Dengan demikian, akuntansi hijau dapat dianggap sebagai strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan nilai perusahaan melalui praktik transparan dalam pengungkapan informasi keberlanjutan yang membangun kepercayaan di kalangan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

3.2.4 Penguatan Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Jangka Panjang

Akuntansi hijau memiliki peran strategis dalam manajemen risiko dan keberlangsungan keuangan perusahaan dengan memasukkan aspek lingkungan dalam sistem akuntansi dan pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan yang relevan di sini adalah penggunaan *Life Cycle Assessment* (LCA) dan *Life Cycle Costing* (LCC) yang membantu perusahaan

mengidentifikasi potensi risiko terkait lingkungan, seperti pencemaran dan regulasi yang berubah-ubah. Penerapan LCA yang dinamis dan otomatis menawarkan wawasan baru yang dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi risiko lingkungan mereka secara lebih efektif (Ingemarsdotter et al., 2023). Selain itu, pentingnya integrasi LCA dan LCC untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan, terutama dalam konteks ketidakpastian sumber daya (Trofimenko, 2025).

Penggunaan akuntansi hijau dapat menciptakan stabilitas arus kas dengan mengurangi volatilitas biaya yang terkait dengan risiko lingkungan. Kaddoura et al., (2019) menemukan bahwa dengan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis, perusahaan tidak hanya melindungi diri dari kerugian, tetapi juga dapat mencapai efisiensi biaya yang lebih baik. Pendekatan ini terutama penting di tengah meningkatnya permintaan pasar akan keberlangsungan, di mana tekanan untuk beroperasi secara lebih ramah lingkungan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi rendah karbon dan inovasi yang mendukung keberlanjutan.

Melalui analisis biaya siklus hidup, perusahaan dapat mengembangkan strategi mitigasi yang lebih tepat, seperti diversifikasi sumber energi dan efisiensi bahan baku, yang tidak hanya mendukung tujuan lingkungan tetapi juga menguntungkan secara finansial. Integrasi LCC dan LCA memungkinkan perusahaan untuk memahami trade-off antara dampak lingkungan dan keuntungan ekonomi dari keputusan mereka (Menna et al., 2018). Dengan cara ini, manajemen bisa lebih siap untuk menghadapi dinamika ekonomi yang berubah, serta memenuhi tuntutan pasar yang kian menekankan pada keberlanjutan.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa akuntansi hijau tidak hanya berfungsi menjaga keberlanjutan finansial, tetapi juga meningkatkan ketahanan perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar dan tantangan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi pendekatan akuntansi hijau ke dalam manajemen risiko seharusnya menjadi prioritas bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang di era keberlanjutan ini.

3.2.5 Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Bisnis

Akuntansi hijau memainkan peran penting dalam pengembangan daya saing dan inovasi bisnis dengan menekankan penciptaan nilai baru berbasis keberlanjutan. Praktik akuntansi hijau menyediakan data lingkungan yang akurat, yang sangat diperlukan perusahaan untuk menciptakan produk dan proses yang lebih efisien serta ramah lingkungan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan preferensi konsumen yang semakin peduli terhadap isu ekologi, dan membuka peluang untuk memasuki pasar hijau yang menguntungkan (Lucia et al., 2020).

Inovasi hijau terbukti mendorong diversifikasi pendapatan, meningkatkan laba, dan memperkuat posisi pasar perusahaan dibandingkan dengan pesaing yang belum beradaptasi dengan tuntutan keberlanjutan. Strategi lingkungan proaktif dapat secara signifikan meningkatkan inovasi hijau dan, pada akhirnya, kinerja perusahaan (Mulaessa & Lefen, 2021). Hal ini menciptakan sinergi yang memungkinkan efisiensi dan reputasi perusahaan meningkat bersamaan dengan nilai finansial yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang (Ramadhan et al., 2022).

Lebih jauh, akuntansi hijau berkontribusi dalam menciptakan sistem manajemen inovasi yang berkelanjutan. Penerapan inovasi hijau mengarah pada peningkatan kinerja finansial yang berkelanjutan dan menciptakan keuntungan kompetitif (Ramadhan et al., 2022). Dalam konteks ini, perusahaan yang mengadopsi praktik-praktik inovatif cenderung berhasil menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, melebihi perusahaan yang tidak mengadopsi praktik serupa.

Dari sudut pandang finansial, akuntansi hijau tidak hanya memfasilitasi perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik tetapi juga membantu dalam memperoleh insentif dan sertifikasi yang dapat meningkatkan nilai jual produk. Adopsi inovasi hijau memengaruhi secara positif kinerja perusahaan melalui pengelolaan sosial dan lingkungan yang lebih baik (Novitasari & Tarigan, 2022). Hal ini menunjuk pada hubungan positif antara inovasi hijau dan kinerja finansial, di mana praktek lingkungan yang baik membantu perusahaan untuk tampil lebih menarik bagi pemangku kepentingan dan investor. Secara keseluruhan, akuntansi hijau berfungsi sebagai pendorong utama bagi perusahaan untuk beralih menuju keberlanjutan, tidak hanya dari segi lingkungan tetapi juga dalam penguatan posisi kompetitif dan kinerja finansial jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Attig, N., Rahaman, M. M., & Trabelsi, S. (2024). Creditors at the Gate: Effects of Selective Environmental Disclosure on the Cost of Debt. *Corporate Governance an International Review*, 33(2), 202–230. <https://doi.org/10.1111/corg.12599>
- Bagas, M. A., Riani, N., & Ekawati, F. (2024). Manajemen Akuntansi Hijau Dalam Efisiensi Biaya Lingkungan Studi Pada Pt. Coca Cola Bottling Indonesia Tanjung Bintang. *Jise*, 3(1), 55–68. <https://doi.org/10.70371/jise.v3i1.85>
- Buallay, A. (2019). Is Sustainability Reporting (ESG) Associated With Performance? Evidence From the European Banking Sector. *Management of Environmental Quality an International Journal*, 30(1), 98–115. <https://doi.org/10.1108/meq-12-2017-0149>
- Buallay, A., Kukreja, G., Aldhaen, E., Mubarak, M. A., & Hamdan, A. (2020). Corporate Social Responsibility Disclosure and Firms' Performance in Mediterranean Countries: A Stakeholders' Perspective. *Euromed Journal of Business*, 15(3), 361–375. <https://doi.org/10.1108/emjb-05-2019-0066>
- Chen, Y. (2025). An Empirical Analysis of the Impact of Environmental Accounting Information Disclosure on Corporate Financing Costs. *Highlights in Business Economics and Management*, 62, 231–238. <https://doi.org/10.54097/7n6jxx22>
- Deswanto, R. B., & Siregar, S. V. (2018). The Associations Between Environmental Disclosures With Financial Performance, Environmental Performance, and Firm Value. *Social Responsibility Journal*, 14(1), 180–193. <https://doi.org/10.1108/srj-01-2017-0005>

- Dye, J., McKinnon, M., & Byl, C. V. d. (2021). Green Gaps: Firm ESG Disclosure and Financial Institutions' Reporting Requirements. *J Sustain Res*, 3(1). <https://doi.org/10.20900/jsr20210006>
- Ingemarsdotter, E., Singhanian, S., & Pallas, G. D. (2023). *Dynamic LCA and LCC With ECOFACT*. 703-711. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28839-5_79
- Jørgensen, S., Mjøs, A., & Pedersen, L. J. T. (2021). Sustainability Reporting and Approaches to Materiality: Tensions and Potential Resolutions. *Sustainability Accounting Management and Policy Journal*, 13(2), 341-361. <https://doi.org/10.1108/sampj-01-2021-0009>
- Kaddoura, M., Kambanou, M. L., Tillman, A., & Sakao, T. (2019). Is Prolonging the Lifetime of Passive Durable Products a Low-Hanging Fruit of a Circular Economy? A Multiple Case Study. *Sustainability*, 11(18), 4819. <https://doi.org/10.3390/su11184819>
- Kurniawan, I., & Rokhim, R. (2023). Is ESG Companies' Performance Influenced by Ownership Structure? Evidence in ASEAN. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(9), 2397-2413. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i9.485>
- Liou, R., Ting, P., & Chen, Y.-Y. (2023). The Cost of Foreign Ownership: Voluntary Sustainability Reporting and Financial Performance in an Emerging Economy. *Cross Cultural & Strategic Management*, 30(3), 581-612. <https://doi.org/10.1108/ccsm-09-2021-0165>
- López-Toro, A. A., Sánchez-Teba, E. M., Benítez-Márquez, M. D., & Rodríguez-Fernández, M. (2021). Influence of ESGC Indicators on Financial Performance of Listed Pharmaceutical Companies. *International Journal of*

Environmental Research and Public Health, 18(9), 4556.
<https://doi.org/10.3390/ijerph18094556>

- Lucia, C. D., Pazienza, P., & Bartlett, M. (2020). Does Good ESG Lead to Better Financial Performances by Firms? Machine Learning and Logistic Regression Models of Public Enterprises in Europe. *Sustainability*, 12(13), 5317. <https://doi.org/10.3390/su12135317>
- Maama, H., & Appiah, K. O. (2019). Green Accounting Practices: Lesson From an Emerging Economy. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(4), 456–478. <https://doi.org/10.1108/qrfm-02-2017-0013>
- Menna, F. D., Dietershagen, J., Loubiere, M., & Vittuari, M. (2018). Life Cycle Costing of Food Waste: A Review of Methodological Approaches. *Waste Management*, 73, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.12.032>
- Mubarokah, A. K., & Setyaningsih, N. D. (2024). Peran Green Accounting Dalam Mewujudkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3449>
- Mulaessa, N., & Lefen, L. (2021). How Do Proactive Environmental Strategies Affect Green Innovation? The Moderating Role of Environmental Regulations and Firm Performance. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(17), 9083. <https://doi.org/10.3390/ijerph18179083>
- Novitasari, M., & Tarigan, Z. J. H. (2022). The Role of Green Innovation in the Effect of Corporate Social Responsibility on Firm Performance. *Economies*, 10(5), 117. <https://doi.org/10.3390/economies10050117>
- Pasko, O., Zhang, Y., Проскурина, H., Sapych, V., & Mykhailova, Y. (2024). Can Enhanced CSR Quality Reduce the Cost of Debt Capital? An Empirical Analysis of CEO Expertise and Non-Financial Reporting Practices in China.

- Investment Management and Financial Innovations*, 21(3), 274–291.
[https://doi.org/10.21511/imfi.21\(3\).2024.23](https://doi.org/10.21511/imfi.21(3).2024.23)
- Pizzi, S., Caputo, F., & Nuccio, E. d. (2024). Do Sustainability Reporting Standards Affect Analysts' Forecast Accuracy? *Sustainability Accounting Management and Policy Journal*, 15(2), 330–354.
<https://doi.org/10.1108/sampj-04-2023-0227>
- Rahcmatulloh, R., & Suranta, E. (2023). The Effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) on Firm Performance With Earnings Management as a Moderation: Empirical Evidence Around COVID-19. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(4), 846–862. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.937>
- Ramadhan, P., Iranti, R., Dohan, D., Purnama, Y., & Nazir, W. R. (2022). COVID-19, Green Innovation and Their Impacts on Financial Performance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3658. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i12.p13>
- Safitri, A., & Sari, F. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Pada Pt Panggung Jaya Indah. *Jaka (Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Auditing)*, 3(1).
<https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6640>
- Santi, A. R., Andi, K., Lindrianasari, L., & Oktavia, R. (2022). Pengaruh Penerapan Material Flow Cost Accounting Terhadap Green Accounting Dan Financial Performance. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 723–732.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2327>
- Sharma, P. D. S. D. R., & Kumar, D. S. N. H. D. S. (2023). A Systematic Evaluation on Factors Influencing Green Accounting Practices of Selected Indian Companies a

Way to Sustainable Development. *Eel*, 13(5), 1007–1015. <https://doi.org/10.52783/eel.v13i5.861>

Subramanyam, K., & Wild, K. (2000). *Financial Statement Analysis*. Irwin/McGraw-Hill.

Tobin, J. (1969). A General Equilibrium Approach To Monetary Theory. *Journal of Money, Credit and Banking*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.2307/1991374>

Trofimenko, I. (2025). Real-Time LCA/LCC Integration: A Framework of Agile Sustainability and Cost Management. *Sustainability*, 17(21), 9433. <https://doi.org/10.3390/su17219433>

Zhao, D., Ngan, S. L., & Jamil, A. H. (2025). When ESG Meets Uncertainty: Financing Cost Effects Under Regulatory Fragmentation and Rating Divergence. *Systems*, 13(6), 465. <https://doi.org/10.3390/systems13060465>

BAB 4

STRATEGI IMPLEMENTASI DAN PENERAPAN AKUNTANSI HIJAU

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sumber daya alam telah menjadi isu global yang menuntut tanggung jawab semua sektor, termasuk dunia bisnis dan profesi akuntansi. Dalam konteks inilah, akuntansi hijau (*green accounting*) muncul sebagai paradigma baru yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan manajerial (Bebbington & Larrinaga, 2014). Akuntansi tidak lagi terbatas hanya pada pencatatan transaksi-transaksi ekonomi semata, melainkan juga berperan dalam mengukur, melaporkan, dan mengungkapkan dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan serta kontribusinya terhadap keberlanjutan (*sustainability*).

Upaya untuk mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan, seperti *IFRS Sustainability Disclosure Standards: IFRS S1 dan S2*, yang diterbitkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Internasional pada tahun 2023, merupakan bukti pengakuan global yang semakin meningkat terhadap hal ini. Standar ini memperkuat peran akuntan dalam mengelola risiko dan peluang ESG dalam pelaporan keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan dan Pelaporan Lingkungan, Sosial, dan Tata

Kelola (ESG) terhadap Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan juga menunjukkan arah kebijakan serupa di Indonesia.

Universitas, lembaga penelitian, dan profesi akuntansi kini dihadapkan pada tantangan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis dan etika keberlanjutan. Pergeseran ini sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* yang dikemukakan oleh Elkington (1997), yang menekankan keseimbangan antara profit (ekonomi), orang (sosial), dan planet (lingkungan) sebagai ukuran kinerja organisasi. Di Indonesia, penerapan akuntansi hijau menjadi semakin relevan seiring meningkatnya komitmen pemerintah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya tujuan ke-12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan tujuan ke-13 tentang Aksi Iklim.

Namun, penerapan akuntansi hijau tidak berjalan dengan mulus. Perusahaan sering menghadapi kesulitan, termasuk keterbatasan data lingkungan, biaya adopsi teknologi ramah lingkungan, dan kekurangan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami prinsip dan praktik akuntansi hijau (Lodhia, 2018). Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang sistematis, terintegrasi, dan kontekstual agar akuntansi hijau dapat diterapkan secara efektif baik di tingkat perusahaan maupun sektor publik.

Bab ini bertujuan menyajikan penjelasan komprehensif tentang strategi implementasi dan pelaksanaan akuntansi hijau, dengan mengintegrasikan perspektif konseptual, regulasi, dan praktis. Diskusi mencakup dasar-dasar teoretis dan kerangka kebijakan, strategi implementasi di organisasi, serta studi kasus nasional dan internasional. Dengan

pendekatan ini, diharapkan dapat mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana akuntansi hijau dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi dan bertanggung jawab.

4.1 Konsep dan Landasan Akuntansi Hijau

Akuntansi hijau adalah pendekatan yang mencoba mengintegrasikan biaya dan manfaat lingkungan ke dalam sistem akuntansi tradisional. Berbeda dari akuntansi konvensional yang hanya fokus pada aspek keuangan, akuntansi hijau menilai kinerja organisasi berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan (Bennett & James, 1998). Dalam kerangka ini, perusahaan tidak hanya diharuskan untuk meraih laba, tetapi juga untuk menjaga kelestarian ekosistem dan mengurangi jejak ekologis dari kegiatan operasionalnya.

Secara konseptual, akuntansi hijau berakar dari teori ekonomi lingkungan yang menekankan pentingnya mengaitkan aktivitas ekonomi dengan kapasitas lingkungan untuk mendukungnya. Pearce dan Turner (1990) memperkenalkan konsep akuntansi lingkungan yang memasukkan valuasi ekonomi sumber daya alam dan dampak degradasi lingkungan. Konsep ini berkembang menjadi *green accounting*, yang tak hanya menghitung biaya eksternal dari polusi dan limbah, tetapi juga mengukur investasi dan inovasi dalam teknologi ramah lingkungan. Secara umum, akuntansi hijau memiliki dua dimensi utama: akuntansi lingkungan yang fokus pada pengukuran biaya dan manfaat kegiatan berdampak lingkungan, dan akuntansi keberlanjutan yang mencakup aspek sosial serta tata kelola sebagai bagian dari sistem pelaporan yang berkelanjutan (Gray, 2010).

Prinsip dasar akuntansi hijau meliputi:

- a. Mengintegrasikan ekonomi dan ekologi: keputusan ekonomi harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- b. Menyediakan transparansi dan akuntabilitas: informasi dampak lingkungan harus diungkapkan secara jujur dan dapat diverifikasi.
- c. Melakukan valuasi lingkungan: sumber daya alam dan jasa lingkungan memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur.
- d. Menjamin keberlanjutan antar generasi: praktik bisnis harus memastikan kesejahteraan generasi mendatang.

Secara global, berbagai lembaga telah mengembangkan kerangka kerja untuk penerapan akuntansi hijau. Pada tahun 2003, *United Nations Division for Sustainable Development (UNSD)* memperkenalkan *System of Environmental-Economic Accounting (SEEA)*, yang menjadi standar internasional dalam mengintegrasikan data ekonomi dan lingkungan ke dalam satu sistem statistik nasional. Sementara itu, *Global Reporting Initiative (GRI)* dengan GRI-Standards menyediakan pedoman pelaporan keberlanjutan yang mencakup indikator lingkungan seperti penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, dan efisiensi sumber daya. Di Indonesia, penerapan prinsip akuntansi hijau semakin diakui melalui kebijakan dan regulasi. Pemerintah meluncurkan program *Green Economy* dalam RPJMN 2020–2024 dan memperkuat pelaporan ESG di sektor perbankan serta pasar modal melalui OJK. Di sektor publik, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai mengadopsi pendekatan SEEA untuk menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) Hijau yang memasukkan faktor lingkungan ke dalam indikator ekonomi nasional (BPS, 2022).

4.2 Regulasi, Standar, dan Kebijakan Pendukung

Penerapan akuntansi hijau sangat bergantung pada kerangka regulasi dan standar yang mengatur pelaporan keberlanjutan di tingkat nasional dan internasional. Regulasi ini memberikan panduan kepada organisasi dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam pelaporan keuangan dan menjamin konsistensi, transparansi, serta akuntabilitas informasi lingkungan. Dalam era globalisasi ekonomi dan pasar modal internasional yang semakin terintegrasi, harmonisasi standar pelaporan menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan terhadap informasi keuangan dan non-keuangan di berbagai yurisdiksi (KPMG, 2022).

4.2.1 Standar Internasional: IFRS *Sustainability Disclosure Standards* (IFRS S1 & S2)

Secara global, *International Financial Reporting Standards (IFRS)* melalui pembentukan *International Sustainability Standards Board (ISSB)* pada tahun 2021 telah memperkenalkan dua standar utama, yakni IFRS S1 – *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan IFRS S2 yaitu *Climate-related Disclosures* (IFRS Foundation, 2023). Kedua standar ini bertujuan untuk menyatukan berbagai kerangka pelaporan keberlanjutan yang sebelumnya bersifat terpisah, seperti *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*, *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, dan *Integrated Reporting Framework (IIRC)*.

Standar IFRS S1 menetapkan prinsip umum pelaporan keberlanjutan yang mengharuskan entitas mengungkapkan informasi penting terkait risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang. Sedangkan IFRS

S2 lebih menekankan pada pengungkapan terkait iklim, termasuk kebijakan mitigasi, target pengurangan emisi karbon, dan strategi penyesuaian terhadap perubahan iklim. Penerapan standar ini memperkuat posisi akuntansi hijau sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang transparan dan berorientasi masa depan. Selain IFRS, GRI (*Global Reporting Initiative*) juga berperan penting dalam menetapkan pedoman pelaporan keberlanjutan. GRI Standards menjadi kerangka utama yang paling banyak digunakan secara global, karena memberikan panduan spesifik tentang indikator kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contohnya, GRI 302 (Energi) dan GRI 305 (Emisi) mengatur pengukuran dan pelaporan konsumsi energi serta gas rumah kaca (GRI, 2021). GRI juga kompatibel dengan standar ISSB, sehingga perusahaan dapat menyusun laporan keberlanjutan sesuai praktik internasional.

4.2.1 Standar Nasional: PSAK terkait Lingkungan, PERMEN, dan Kebijakan Pemerintah Indonesia

Di Indonesia, kebijakan akuntansi hijau telah diadopsi dalam berbagai regulasi nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah salah satu lembaga terdepan yang mengatur pelaporan keberlanjutan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017, yang mengatur Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi ini mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, OJK meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan (2015–2025) yang menegaskan pentingnya transformasi sektor keuangan menuju praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (OJK, 2022).

Dari sisi akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai mengembangkan pedoman pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan PSAK berbasis IFRS. Meskipun belum ada PSAK khusus tentang akuntansi hijau, beberapa standar seperti PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan) dan PSAK 69 (Agrikultur) telah memberi ruang untuk pengungkapan informasi lingkungan yang berkaitan dengan dampak ekonomi dan aset biologis. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Program PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) turut mendorong perusahaan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lingkungan. Data dari PROPER sering dipakai sebagai dasar laporan keberlanjutan dan menjadi bukti nyata penerapan prinsip akuntansi hijau di sektor industri.

Pada tingkat makro, Badan Pusat Statistik (BPS), bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, telah mengintegrasikan *System of Environmental-Economic Accounting (SEEA)* ke dalam sistem statistik nasional. Langkah ini memungkinkan perhitungan Produk Domestik Bruto Hijau (*Green GDP*) yang mempertimbangkan biaya degradasi lingkungan dan nilai ekonomi sumber daya alam (BPS, 2022).

4.2.3 Agenda ESG (*Environmental, Social, Governance*) dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Integrasi akuntansi hijau juga sangat terkait dengan agenda global *Environmental, Social, and Governance (ESG)* serta *Sustainable Development Goals (SDGs)*. ESG merupakan kerangka kerja utama bagi investor untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan, sementara SDGs memberikan panduan strategis untuk pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030. Dalam

konteks ini, akuntansi hijau berfungsi sebagai sistem pengukuran dan pelaporan yang menyediakan data kuantitatif dan kualitatif guna mendukung pengambilan keputusan berbasis keberlanjutan. Indonesia, sebagai anggota G20, juga berkomitmen terhadap transisi hijau melalui *Energy Transition Mechanism (ETM)* dan *Sustainable Finance Framework* yang bertujuan mengurangi emisi karbon. Dengan demikian, harmonisasi antara regulasi nasional, standar akuntansi, dan inisiatif global menjadi fondasi penting untuk mempercepat adopsi akuntansi hijau secara menyeluruh.

4.2.4 Keterkaitan Kebijakan Pajak, Lingkungan, dan Akuntansi Hijau

Meskipun banyak inisiatif regulatif yang sudah ada, penerapan akuntansi hijau masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tidak adanya standar pelaporan yang seragam antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, dan rendahnya kesadaran perusahaan tentang manfaat jangka panjang dari pelaporan lingkungan (UNDP Indonesia, 2023). Oleh karena itu, sinergi antara lembaga regulator seperti OJK, KLHK, IAI, dan Bappenas sangat penting untuk membangun kerangka kebijakan yang harmonis dan mendukung penggunaan akuntansi hijau di berbagai sektor. Dengan regulasi dan standar yang kuat, akuntansi hijau tidak lagi bersifat sukarela, tetapi menjadi bagian dari sistem tata kelola yang wajib dipatuhi. Kombinasi kebijakan nasional dan standar internasional akan memperkuat posisi Indonesia dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan menciptakan pembangunan berkelanjutan yang adil.

4.3 Kerangka Konseptual Implementasi Akuntansi Hijau

Keberhasilan penerapan akuntansi hijau di tingkat organisasi sangat bergantung pada pemahaman terhadap kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi lingkungan dengan sistem akuntansi konvensional. Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis Keberhasilan dalam menerapkan akuntansi hijau di organisasi sangat tergantung pada pemahaman kerangka konseptual yang menggabungkan aspek lingkungan dengan sistem akuntansi konvensional. Kerangka ini berfungsi tidak hanya sebagai panduan teknis untuk pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai alat strategis yang mendorong pengambilan keputusan berkelanjutan. Dalam era global yang semakin menuntut transparansi lingkungan dan akuntabilitas sosial, organisasi harus mengembangkan sistem akuntansi yang mampu mengukur dampak ekonomi, sosial, dan ekologis secara menyeluruh (Burritt & Schaltegger, 2010).

Agar mendukung pengambilan keputusan yang berfokus pada keberlanjutan, organisasi harus mengembangkan sistem akuntansi yang mampu secara komprehensif mengukur dampak ekonomi, sosial, dan ekologis. Hal ini penting mengingat kebutuhan global akan transparansi lingkungan dan akuntabilitas sosial yang semakin meningkat.

4.3.1 Dimensi Input, Process, Output, Outcome dalam Akuntansi Hijau

Model konseptual implementasi akuntansi hijau dapat dijelaskan melalui pendekatan *Input-Process-Output-Outcome (IPOO)* yang banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik dan manajemen kinerja.

- a. Input mencakup sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ekonomi, seperti energi, air, bahan baku, dan modal lingkungan (*environmental capital*).

- b. Process menggambarkan aktivitas operasional yang berdampak pada lingkungan, termasuk penggunaan teknologi, efisiensi energi, serta manajemen limbah.
- c. Output berupa produk, jasa, dan limbah yang dihasilkan dari proses produksi, yang kemudian memiliki nilai ekonomi maupun ekologis.
- d. Outcome mencerminkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan, seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi sumber daya, dan reputasi perusahaan di mata stakeholder.

Dengan penggunaan kerangka IPOO, perusahaan mampu memetakan proses konversi sumber daya alam menjadi hasil ekonomi sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pendekatan ini mempermudah manajemen dalam mengidentifikasi titik penting dalam rantai nilai yang membutuhkan intervensi hijau, seperti substitusi bahan baku, peningkatan efisiensi energi, dan inovasi dalam produksi bersih.

4.3.2 Integrasi Akuntansi Hijau dalam Sistem Akuntansi Manajemen dan Keuangan

Implementasi akuntansi hijau tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam dua subsistem utama akuntansi: akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dalam konteks akuntansi manajemen, akuntansi hijau dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan strategis terkait efisiensi biaya lingkungan, analisis siklus hidup produk (*life cycle cost analysis*), serta penilaian kinerja lingkungan perusahaan. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menilai *eco-efficiency* yakni kemampuan perusahaan meningkatkan kinerja ekonomi sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan (Schaltegger & Sturm, 1990).

Dalam akuntansi keuangan, prinsip akuntansi hijau diterapkan melalui pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset dan kewajiban lingkungan. Misalnya, perusahaan dapat mencatat provisi biaya reklamasi dari kegiatan pertambangan atau aset lingkungan seperti sistem pengolahan limbah dan teknologi hemat energi. Pengungkapan tersebut meningkatkan transparansi kepada investor dan publik mengenai seberapa jauh perusahaan menginternalisasi biaya eksternalitas lingkungan dalam laporan keuangannya. Integrasi dari kedua sistem ini menciptakan sistem akuntansi tertutup, di mana setiap keputusan manajerial dan laporan keuangan mempertimbangkan dampak ekologis. Model ini sejalan dengan praktik *Environmental Management Accounting (EMA)* yang direkomendasikan oleh *United Nations Division for Sustainable Development (UNSD, 2001)*.

4.3.3 Model Integratif: Triple Bottom Line Reporting (Profit, People, Planet)

Salah satu model paling berpengaruh dalam akuntansi hijau adalah *Triple Bottom Line (TBL) Reporting*, yang dikenalkan oleh John Elkington pada 1997. Model ini mengukur kinerja organisasi melalui tiga aspek: *profit* (ekonomi), *people* (sosial), dan *planet* (lingkungan). Aspek profit menilai keberlanjutan finansial perusahaan. Aspek people memeriksa dampak sosial terhadap karyawan, masyarakat, dan pelanggan. Sedangkan, aspek planet menilai sejauh mana organisasi mengurangi kerusakan lingkungan dan menjaga sumber daya alam.

TBL mendorong organisasi untuk mengalihkan perhatian dari nilai *shareholder* ke *stakeholder*, yakni menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan ekosistem. Dalam pelaporan, TBL dapat

diimplementasikan melalui *Sustainability Report* atau *Integrated Report* yang menampilkan indikator kuantitatif dan kualitatif dari ketiga dimensi tersebut. Indonesia mulai mengadopsi pendekatan TBL, khususnya di perusahaan publik dan BUMN yang diwajibkan membuat laporan keberlanjutan. Sebagai contoh, PT Pertamina dan PT Bank BNI telah merilis laporan keberlanjutan berbasis GRI yang mencakup indikator energi, emisi, dan tanggung jawab sosial, menandakan bahwa model TBL semakin diterima sebagai norma dalam praktik akuntansi hijau di Indonesia.

4.3.4 Kerangka Pengukuran dan Pelaporan Dampak Lingkungan

Kerangka pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan dalam akuntansi hijau meliputi beberapa aspek utama:

- a. Identifikasi biaya lingkungan meliputi biaya pencegahan polusi, pengolahan limbah, dan pemulihan ekosistem.
- b. Valuasi sumber daya alam dilakukan dengan pendekatan seperti nilai pasar, biaya penggantian, atau valuasi kontinjensi untuk menilai nilai ekonomi aset lingkungan.
- c. Indikator kinerja lingkungan (EPIs) mencakup intensitas energi, emisi gas rumah kaca per satuan produksi, dan efisiensi penggunaan air.
- d. Pelaporan dampak secara kualitatif mengungkapkan kebijakan, inisiatif, dan pencapaian perusahaan dalam bidang lingkungan.

Kerangka ini memungkinkan perusahaan untuk secara obyektif mengukur efisiensi ekologis, menilai kontribusinya terhadap SDGs, dan membangun kepercayaan dengan stakeholder melalui transparansi

informasi lingkungan. Menurut OECD (2020), pelaporan yang terukur dan standar akan memperkuat akuntabilitas perusahaan serta meningkatkan akses terhadap pembiayaan hijau (green financing). Dengan adanya kerangka yang kuat, penerapan akuntansi hijau bisa dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kebijakan nasional serta standar internasional. Model ini juga mendukung perusahaan dalam bertransisi ke praktik bisnis berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4.4 Strategi Implementasi di Level Operasional

Pelaksanaan akuntansi hijau di tingkat organisasi memerlukan pendekatan strategis yang menyeluruh, termasuk dukungan dari manajemen puncak, kebijakan perusahaan yang tegas, penguatan sistem informasi, dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Akuntansi hijau bukan hanya sekedar sistem pencatatan yang baru, tetapi juga merupakan transformasi paradigma menuju tata kelola yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yakni pengelolaan yang menyeimbangkan kinerja ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Qian & Burritt, 2011). Oleh karena itu, strategi pelaksanaan harus dirancang agar sesuai dengan visi perusahaan, memenuhi regulasi, dan memenuhi harapan publik terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.

4.4.1 Komitmen Manajemen dan Kepemimpinan Hijau

Langkah pertama dalam menerapkan akuntansi hijau adalah membangun komitmen dari tingkat manajemen tertinggi. Kepemimpinan hijau sangat penting untuk menanamkan nilai keberlanjutan dalam budaya organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa

perusahaan yang didukung manajemen puncak secara kuat lebih mampu mengintegrasikan prinsip lingkungan ke dalam strategi bisnis mereka (Epstein & Buhovac, 2014). Di Indonesia, perusahaan seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan contoh bagaimana kepemimpinan hijau mendorong perubahan organisasi melalui pembentukan komite keberlanjutan dan unit khusus yang mengurus akuntansi dan pelaporan lingkungan. Komitmen ini tercermin dari kebijakan formal, pengalokasian anggaran untuk kegiatan hijau, serta pelaporan keberlanjutan tahunan yang diverifikasi secara independen.

4.4.2 Pembentukan *Green Accounting Policy Framework*

Setelah manajemen membuat komitmen, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka kebijakan akuntansi hijau (*Green Accounting Policy Framework*). Kerangka ini berfungsi sebagai panduan resmi yang merinci prinsip, metode, dan prosedur pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan informasi lingkungan dalam sistem akuntansi perusahaan. Kebijakan tersebut sebaiknya mencakup:

- a. Definisi dan cakupan aktivitas yang terkait dengan pengelolaan lingkungan.
- b. Klasifikasi biaya lingkungan yang meliputi biaya pencegahan polusi, pengelolaan limbah, konservasi energi, dan inovasi hijau.
- c. Metode penilaian aset lingkungan, baik berdasarkan biaya historis maupun biaya pengganti.
- d. Panduan pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan.

Di tingkat nasional, kerangka ini dapat disesuaikan dengan PSAK berbasis IFRS, GRI Standards, dan pedoman OJK tentang pelaporan keuangan berkelanjutan. Penerapan kebijakan ini tidak hanya meningkatkan

kepatuhan, tetapi juga memperkuat reputasi organisasi di mata investor yang semakin memperhatikan aspek ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

4.4.3 Integrasi Akuntansi Hijau dalam Proses Bisnis dan Rantai Nilai

Akuntansi hijau yang efektif tidak hanya sebatas pelaporan, tetapi harus terintegrasi ke semua proses bisnis dan rantai nilai perusahaan. Hal ini meliputi perencanaan produksi, pengadaan bahan, pengelolaan energi, logistik, dan pengolahan limbah. Konsep *Green Value Chain* (Porter & Kramer, 2011) menegaskan bahwa setiap aktivitas dalam rantai nilai bisa menjadi sumber efisiensi dan peluang pengurangan dampak lingkungan. Contohnya, penerapan *eco-design* dalam pengembangan produk tidak hanya mengurangi penggunaan bahan mentah, tetapi juga menekan biaya produksi jangka panjang. Dengan demikian, akuntansi hijau berfungsi sebagai sistem pengukuran yang membantu perusahaan menilai dampak finansial dari kebijakan efisiensi energi, daur ulang bahan, dan investasi teknologi hijau.

4.4.4 Pengembangan Kapasitas SDM Akuntansi Berbasis Sustainability

Salah satu faktor kunci keberhasilan penerapan akuntansi hijau adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM). Akuntan harus memahami aspek teknis laporan keuangan sekaligus memiliki literasi lingkungan dan sosial yang cukup. Pelatihan internal, sertifikasi profesi, dan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi menjadi penting untuk mengembangkan kompetensi ini. Di Indonesia, kolaborasi antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), OJK, dan universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Bengkulu, serta Universitas Gadjah Mada

mulai mendorong integrasi green accounting ke dalam kurikulum akuntansi. Langkah ini sesuai dengan tujuan ACCA Global Qualification yang telah memasukkan keberlanjutan dan kemampuan digital ke dalam kurikulum akuntansi internasional (ACCA, 2023).

4.4.5 Sistem Pelaporan dan Audit Lingkungan

Pelaporan keberlanjutan adalah bagian penting dari penerapan akuntansi hijau. Sistem ini bertujuan menyediakan informasi transparan tentang kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan. Banyak perusahaan memakai *GRI Standards* sebagai panduan pelaporan, yang kemudian diverifikasi melalui audit lingkungan untuk memastikan keandalan dan ketepatan data. Audit ini bisa dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal dan meliputi penilaian pengendalian limbah, efisiensi energi, kepatuhan regulasi, serta efektivitas sistem pelaporan. Di sektor industri ekstraktif Indonesia, seperti pertambangan dan energi, audit lingkungan menjadi persyaratan wajib sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui PROPER.

4.4.6 Penggunaan Teknologi Hijau dan Digitalisasi dalam Akuntansi

Kemajuan teknologi digital telah membuka peluang besar untuk menerapkan akuntansi hijau secara lebih efisien dan akurat. Teknologi hijau dan sistem akuntansi digital memungkinkan otomatisasi pencatatan data lingkungan, pemantauan emisi secara real-time, serta analisis dampak lingkungan menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan analitik big data (Lozano et al., 2021). Misalnya, penerapan *Internet of Things (IoT)* di pabrik manufaktur dapat mengumpulkan data konsumsi energi dan emisi yang langsung terintegrasi dengan sistem

akuntansi lingkungan. Selain itu, blockchain mulai digunakan untuk mencatat jejak karbon dan transaksi kredit karbon (*carbon credit trading*) dengan tingkat transparansi tinggi. Untuk organisasi di Indonesia, adopsi teknologi hijau ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menjadi keunggulan kompetitif dalam iklim persaingan global yang semakin menitikberatkan keberlanjutan digital.

4.5 Pendekatan Strategis Penerapan

Implementasi akuntansi hijau membutuhkan tidak hanya perubahan teknis di level organisasi, tetapi juga strategi penerapan yang sistematis, terstruktur, dan fleksibel sesuai konteks kebijakan nasional dan dinamika global. Secara praktik, pendekatan strategis terbagi menjadi dua orientasi utama: top-down dan bottom-up, yang saling melengkapi untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan (Burritt & Christ, 2016). Selain itu, kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat—yang dikenal sebagai Triple Helix Collaboration menjadi elemen penting dalam memperkuat pelaksanaan akuntansi hijau. Pendekatan ini memastikan bahwa pergeseran menuju sistem ekonomi hijau tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif dan partisipatif.

4.5.1 *Top-Down Approach*: Kebijakan, Regulasi, dan Insentif Pemerintah

Pendekatan top-down menekankan inisiatif dari pemerintah dan regulator yang menentukan kerangka hukum, regulasi, dan insentif untuk mendorong penerapan akuntansi hijau. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan utama yang mendukung pergeseran menuju ekonomi hijau, termasuk

Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris.

Pemerintah juga mulai menerapkan Green Taxonomy, yakni klasifikasi aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dan membantu lembaga keuangan menilai kelayakan proyek hijau (OJK, 2022). Dengan adanya insentif hijau, seperti pembiayaan hijau, keringanan pajak, dan kredit karbon, perusahaan terdorong secara ekonomi untuk mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan. Selain sektor keuangan, kebijakan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui PROPER dan Bappenas lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 turut mendorong pelaporan lingkungan. Pendekatan top-down ini menciptakan tekanan regulasi yang penting untuk mempercepat penerapan prinsip akuntansi hijau dalam tata kelola perusahaan.

4.5.2 Bottom-Up Approach: Inisiatif Internal dan Budaya Organisasi Hijau

Berbeda dengan pendekatan *top-down*, strategi bottom-up menekankan perubahan yang berasal dari dalam organisasi melalui pembentukan budaya, inovasi, dan kesadaran lingkungan karyawan. Pendekatan ini bersifat partisipatif dan berfokus pada nilai-nilai internal perusahaan, bukan hanya karena kewajiban regulasi. Organisasi yang sukses dalam menerapkan strategi ini biasanya mengembangkan budaya perusahaan hijau, yaitu budaya kerja yang menanamkan kesadaran ekologis dalam setiap aktivitas bisnis. Contohnya, penerapan kebijakan *zero waste office*, efisiensi energi,

dan penggunaan kertas digital tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga memperkuat citra perusahaan sebagai pelaku bisnis yang beretika lingkungan (Daily et al., 2009). Selain itu, pendekatan *bottom-up* juga meningkatkan rasa memiliki (*ownership*) di antara karyawan terhadap agenda keberlanjutan. Ketika pegawai memahami hubungan antara tanggung jawab individu dan dampak lingkungan organisasi, mereka cenderung mendukung penerapan akuntansi hijau secara berkelanjutan.

4.5.3 Sinergi Akademisi, Bisnis dan Pemerintah (*Triple Helix*) dalam Penerapan

Dalam konteks implementasi yang efektif, pendekatan triple helix yang melibatkan kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah menjadi salah satu model paling ideal. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi:

- a. Pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi dan fasilitator kebijakan.
- b. Dunia bisnis bertanggung jawab langsung terhadap penerapan akuntansi hijau melalui pelaporan dan inovasi teknologi.
- c. Akademisi berperan dalam melakukan riset, mengembangkan konsep, dan melatih sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi keberlanjutan.

Di Indonesia, model kolaboratif ini mulai muncul dalam kerja sama antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), OJK, dan universitas negeri untuk mengembangkan modul pelatihan Green Accounting and Sustainable Finance. Kolaborasi ini mempercepat transfer pengetahuan dan mendorong penerapan praktik akuntansi hijau yang berbasis bukti empiris. Selain itu, kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNDP,

World Bank, dan Asian Development Bank (ADB) telah mendukung proyek kapasitas dan inisiatif pelaporan hijau di berbagai daerah, termasuk sektor energi terbarukan, agribisnis, dan keuangan mikro hijau.

4.5.4 Strategi Komunikasi dan Pelibatan Stakeholder

Implementasi akuntansi hijau secara efektif memerlukan komunikasi strategis yang mampu menjembatani berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Komunikasi ini penting agar semua pihak memahami tujuan, manfaat, dan tanggung jawab dalam proses transisi ke akuntansi hijau. Perusahaan harus mengembangkan strategi komunikasi keberlanjutan melalui media laporan keberlanjutan, forum pemangku kepentingan, dan publikasi ESG. Komunikasi yang transparan dan berbasis data akan meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, dan masyarakat terhadap integritas dan komitmen organisasi (Freeman et al., 2020). Di Indonesia, praktik keterlibatan pemangku kepentingan mulai diterapkan oleh BUMN dan perusahaan publik yang tergabung dalam *Indonesia Global Compact Network (IGCN)*. Forum-forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan kepentingan bisnis dan lingkungan dalam semangat kolaborasi demi keberlanjutan.

4.5.5 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah bagian penting dalam memastikan keberhasilan penerapan strategi akuntansi hijau. Proses ini menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan, dan menyediakan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Monev dapat dilakukan melalui *Environmental Performance Evaluation (EPE)* sesuai pedoman ISO 14031, yang mencakup penilaian input (sumber daya),

output (limbah, emisi), serta outcome (dampak lingkungan). Selain itu, organisasi bisa menggunakan *Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)* untuk mengintegrasikan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sistem penilaian kinerja manajemen (Figge et al., 2002).

Di tingkat nasional, mekanisme pemantauan dilakukan oleh lembaga seperti OJK (melalui *Sustainability Report Review*) dan KLHK (melalui PROPER). Pendekatan ini menciptakan siklus evaluasi yang menghubungkan kebijakan pemerintah, pelaksanaan korporasi, dan hasil lingkungan yang dapat diukur. Dengan menggabungkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan komunikasi dengan stakeholder, organisasi dapat mengembangkan strategi implementasi akuntansi hijau yang lebih inklusif, adaptif, dan berjangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya mengubah cara organisasi mencatat transaksi ekonomi, tetapi juga bagaimana mereka menafsirkan nilai dan tanggung jawab terhadap bumi dan masyarakat.

4.6 Studi Kasus Penerapan Akuntansi Hijau

4.6.1 Implementasi Akuntansi Hijau di Perusahaan Pertambangan

Sektor pertambangan adalah salah satu industri yang paling berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga menjadi fokus utama dalam implementasi akuntansi hijau. PT Bukit Asam Tbk (PTBA), sebagai BUMN di bidang pertambangan batu bara, telah menjadi pelopor dalam penerapan prinsip akuntansi hijau di Indonesia. Perusahaan ini memakai *Environmental Management Accounting (EMA)* untuk mencatat dan melaporkan biaya

lingkungan seperti reklamasi lahan pascatambang, pengolahan air asam tambang, dan investasi dalam energi bersih (PLTS Bukit Asam 2x15 MW di Tanjung Enim). Dalam laporan keberlanjutan PTBA tahun 2023, perusahaan mengungkapkan nilai biaya lingkungan sebesar Rp312 miliar yang dialokasikan untuk konservasi energi, restorasi lahan, serta penelitian pengurangan emisi karbon (PTBA, 2023). Laporan itu disusun berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI) dan mengadopsi prinsip *Triple Bottom Line*, dengan penekanan pada aspek “Planet”.

PTBA juga melakukan pelaporan emisi karbon sesuai dengan metodologi *Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)*, dengan sasaran pengurangan emisi sebesar 30% pada tahun 2030. Data lingkungan dikumpulkan melalui sistem digital berbasis *Environmental Performance Monitoring System* yang terhubung langsung ke unit akuntansi perusahaan. Ini menunjukkan bagaimana penggabungan teknologi dan sistem pelaporan digital dapat memperkuat akuntabilitas dan efisiensi dalam akuntansi hijau di sektor energi dan pertambangan. Implementasi ini tidak hanya mematuhi regulasi KLHK melalui PROPER, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor ESG dan memperbaiki reputasi PTBA sebagai perusahaan tambang yang berkomitmen terhadap transisi energi yang berkelanjutan.

4.6.2 Praktik Sustainability Reporting di Sektor Perbankan

Sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan hijau dan sebagai pendorong implementasi akuntansi hijau melalui *green finance*. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) adalah salah satu bank nasional yang secara konsisten menerapkan

pelaporan keberlanjutan sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 dan *standar internasional GRI*. Dalam *Sustainability Report 2022*, BNI menyatakan bahwa portofolio pembiayaan hijau mencapai Rp188,9 triliun, yang meliputi sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah (BNI, 2022). Penerapan akuntansi hijau di BNI dilakukan melalui:

- Kerangka Akuntansi Hijau yang mencatat dan mengklasifikasikan pendanaan berbasis ESG.
- *Environmental Risk Analysis System* untuk menilai risiko lingkungan sebelum memberikan kredit.
- *Carbon Accounting Initiative*, bekerja sama dengan OJK dan IFC, dalam mengukur dampak emisi dari pembiayaan korporasi.

BNI juga menerapkan *Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)* dalam sistem penilaian kinerja internal, termasuk indikator seperti efisiensi energi di kantor cabang, penggunaan kertas digital, dan pelatihan literasi keuangan berkelanjutan untuk karyawan. Secara global, praktik ini sejalan dengan tren perbankan hijau yang dijalankan oleh lembaga seperti HSBC dan DBS Bank Singapore, yang menjadikan keberlanjutan sebagai bagian inti strategi bisnis mereka. Dengan demikian, BNI menunjukkan bahwa penerapan akuntansi hijau di sektor keuangan tidak sekadar soal pelaporan, tetapi juga tentang mengubah strategi bisnis menuju keuangan yang berkelanjutan dan inklusif.

4.6.3 UMKM dan Strategi Green Accounting Berbasis Komunitas

Selain perusahaan besar, penerapan akuntansi hijau mulai diterapkan oleh UMKM berbasis komunitas, terutama di bidang pertanian organik dan pengolahan limbah. Contoh menarik datang dari Koperasi Hijau

Bengkulu (KHB), sebuah koperasi yang fokus pada produksi pupuk organik dan pengolahan limbah rumah tangga menjadi bahan bakar alternatif. Mereka menggunakan prinsip akuntansi hijau yang sederhana dalam pencatatan keuangan, dengan bantuan mahasiswa Universitas Bengkulu melalui program pengabdian masyarakat berbasis Pendidikan Akuntansi Berkelanjutan. Pencatatan ini tidak hanya meliputi transaksi ekonomi, tetapi juga mencatat “nilai ekologis” seperti jumlah limbah yang didaur ulang, air yang dihemat, dan emisi yang dikurangi.

Dengan memanfaatkan aplikasi berbasis *Microsoft Excel* dan alat akuntansi berbasis cloud, KHB dapat mengukur dampak lingkungan dan mengintegrasikannya ke dalam laporan keuangan koperasi. Model ini menunjukkan penerapan pendekatan bottom-up, di mana kesadaran lingkungan berkembang dari komunitas dan diimplementasikan melalui kolaborasi akademik. Praktik semacam ini mencerminkan kearifan lokal yang mendukung tujuan SDGs, terutama Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan Tujuan 13 (Aksi Iklim). Meskipun skala kegiatan relatif kecil, dampak sosial dan edukatifnya besar karena mampu meningkatkan literasi keuangan hijau di tingkat akar rumput.

4.6.4 Analisis Perbandingan dan *Best Practices*

Ketiga studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menerapkan akuntansi hijau tergantung pada tiga pilar utama:

- a. Kepatuhan dan komitmen terhadap regulasi (seperti kasus PTBA dan BNI).
- b. Inovasi serta integrasi teknologi dalam sistem pelaporan (PTBA dan BNI).

c. Keterlibatan sosial dan kolaborasi dengan komunitas (KHB).

Dibandingkan dengan praktik internasional, penerapan akuntansi hijau di Indonesia masih bersifat hibrida, menggabungkan regulasi resmi dan inisiatif sukarela. Namun, tren menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas pelaporan, transparansi, dan partisipasi stakeholder (KPMG, 2022). Praktik terbaik global, seperti Integrated Reporting Framework (IIRC) dan *EU Taxonomy for Sustainable Activities*, bisa dijadikan acuan untuk memperkuat struktur akuntansi hijau nasional. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas lokal menjadi kunci dalam memperluas penerapan prinsip keberlanjutan ke sektor ekonomi mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- ACCA. (2023). Sustainability and Digital Skills in Accounting Education: Global Qualification Framework. London: ACCA.
- Bank Negara Indonesia (BNI). (2022). Sustainability Report 2022: Empowering Sustainable Growth. Jakarta: BNI.
- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39*(6), 395–413.
- Bennett, M., & James, P. (1998). *The Green Bottom Line: Environmental Accounting for Management*. Greenleaf Publishing.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2022). Sistem Akuntansi Lingkungan dan Ekonomi Indonesia (SEEA). Jakarta: BPS.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2022). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Burritt, R. L., & Christ, K. L. (2016). Industry 4.0 and environmental accounting: A new revolution? *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 1(1), 23–38.
- Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2010). Sustainability accounting and reporting: Fad or trend? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 23(7), 829–846.
- Daily, B. F., Bishop, J. W., & Steiner, R. (2009). The mediating role of employee commitment between HR practices and perceived environmental performance. *Journal of Environmental Management*, 90(2), 805–812.
- Delgado-Ceballos, J., Aragón-Correa, J. A., Ortiz-de-Mandojana, N., & Rueda-Manzanares, A. (2012). The effect of

- internal barriers on the connection between stakeholder integration and proactive environmental strategies. *Journal of Business Ethics*, 107(3), 281–293.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing.
- Epstein, M. J., & Buhovac, A. R. (2014). *Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts*. Berrett-Koehler Publishers.
- Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., & Wagner, M. (2002). The Sustainability Balanced Scorecard – Linking sustainability management to business strategy. *Business Strategy and the Environment*, 11(5), 269–284.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & de Colle, S. (2020). *Stakeholder Theory: The State of the Art*. Cambridge University Press.
- Global Reporting Initiative (GRI). (2021). *GRI Standards 2021: Universal Standards*. Amsterdam: GRI.
- Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability... and how would we know? *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 47–62.
- IFRS Foundation. (2023). *IFRS S1 & S2: Sustainability Disclosure Standards*. London: IFRS.
- IFRS Foundation. (2023). *ISSB Issues IFRS S1 and S2: Global Sustainability Disclosure Standards*. London: IFRS Foundation.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). *The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*. Harvard Business School Press.

- KPMG. (2022). The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2022. Amsterdam: KPMG International.
- KPMG. (2022). The Time Has Come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2022. Amsterdam: KPMG International.
- Lako, A. (2018). Green Economy dan Akuntansi Hijau: Paradigma Baru Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Lodhia, S. (2018). Exploring the transition to integrated reporting through a practice lens: An Australian perspective. *Journal of Business Ethics*, 150(2), 613–631.
- Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F. J., & Sammalisto, K. (2021). Digitalization and sustainable business models: Systematic review. *Journal of Cleaner Production*, 281, 125-130.
- Marques, A., & Ferreira, F. (2020). Blockchain technology in carbon accounting: Opportunities and challenges. *Sustainability*, 12(9), 4026.
- OECD. (2020). Green Finance and Carbon Accounting Frameworks. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). Measuring the Environmental Performance of Companies: A Framework for Policy and Action. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025). Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Taksonomi Hijau Indonesia (Green Taxonomy Indonesia) Versi 1.0. Jakarta: OJK.

- Owen, D. (2013). Assurance practice in sustainability reporting: An assessment of trends. *Accounting Forum*, 37(3), 159–166.
- Pearce, D., & Turner, R. K. (1990). *Economics of Natural Resources and the Environment*. Harvester Wheatsheaf.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.
- PT Bukit Asam Tbk. (2023). Laporan Keberlanjutan 2023: Transforming Energy for Sustainability. Jakarta: PTBA.
- Qian, W., & Burritt, R. (2011). Environmental management accounting: A case study of cleaner production in China. *Journal of Cleaner Production*, 19(9-10), 1010–1018.
- Schaltegger, S., & Burritt, R. L. (2018). Business cases and corporate engagement with sustainability: Differentiating ethical motivations. *Journal of Business Ethics*, 147(2), 241–259.
- Schaltegger, S., & Burritt, R. L. (2018). Contemporary environmental accounting: Issues, concepts and practice. Routledge.
- UNDP Indonesia. (2023). Advancing Green and Sustainable Finance in Indonesia. Jakarta: UNDP.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2021). Green Economy Transition in Indonesia. Jakarta: UNDP Indonesia.
- United Nations Division for Sustainable Development (UNSD). (2001). Environmental Management Accounting Procedures and Principles. New York: United Nations.
- United Nations. (2003). *System of Environmental-Economic Accounting (SEEA 2003)*. New York: UN.

BAB 5

AKUNTANSI HIJAU BERBASIS ETIKA BISNIS

Perubahan kondisi iklim global, menurunnya ketersediaan sumber daya alam, serta tekanan dari para pemangku kepentingan mengharuskan organisasi mengintegrasikan dimensi lingkungan dalam pengukuran kinerja dan proses pengambilan keputusan bisnis. Kebutuhan ini muncul karena risiko iklim, seperti banjir, kekeringan, dan gangguan rantai pasok, memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional dan keberlanjutan usaha, sehingga perusahaan wajib mengukur dan mengantisipasi dampak lingkungannya secara sistematis (Alaika & Firmansyah, 2024). Risiko iklim merupakan ancaman nyata yang dapat secara langsung mengganggu aktivitas operasional perusahaan setiap hari. Banjir berpotensi merusak fasilitas, menghentikan proses produksi, serta meningkatkan biaya distribusi; kekeringan bisa menghambat ketersediaan air bagi sektor manufaktur maupun pertanian; dan cuaca ekstrem yang memicu gangguan rantai pasok dapat menyebabkan kekurangan bahan baku serta naiknya biaya produksi. Seluruh risiko tersebut membawa konsekuensi finansial yang besar, sehingga perusahaan perlu melakukan perhitungan, pemantauan, dan langkah antisipatif terhadap dampak lingkungan demi menjaga efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing jangka panjang (Adisty & Sumarna, 2025).

Di samping itu, berbagai pemangku kepentingan mulai dari regulator, investor, konsumen, dan masyarakat semakin menuntut perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab lingkungan melalui pelaporan kinerja yang transparan dan menyatu dalam sistem manajemen mereka. Apabila aspek lingkungan tidak dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, perusahaan berisiko menghadapi persoalan hukum, merosotnya reputasi, berkurangnya kepercayaan investor, serta potensi kerugian finansial. Oleh karena itu, mengintegrasikan faktor lingkungan ke dalam kinerja dan kebijakan bisnis bukan hanya bentuk respons terhadap tekanan eksternal, tetapi merupakan langkah adaptif yang krusial untuk memperkuat ketahanan perusahaan menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar global.

Akuntansi konvensional yang berfokus pada kinerja finansial jangka pendek tidak mampu menggambarkan secara menyeluruh berbagai biaya eksternalitas lingkungan, seperti polusi udara, kerusakan ekosistem, emisi karbon, degradasi tanah, serta ancaman banjir dan kekeringan yang timbul akibat aktivitas industri (Khomsiyah et al, 2023). Padahal, seluruh dampak tersebut membawa konsekuensi ekonomi jangka panjang yang dirasakan baik oleh perusahaan maupun masyarakat. Karena tidak dicatat dalam laporan keuangan tradisional, biaya-biaya tersebut kerap tidak tampak, maka kondisi perusahaan terlihat lebih menguntungkan daripada kenyataannya. Selain itu, orientasi laba jangka pendek dalam akuntansi tradisional menyebabkan perusahaan cenderung mengejar efisiensi sesaat meskipun keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang membebani generasi berikutnya. Contohnya, penggunaan air secara berlebihan, penebangan hutan, atau pembuangan limbah sembarangan mungkin tidak menimbulkan beban biaya yang signifikan pada laporan keuangan tahun berjalan, namun memberikan dampak ekologis dan ekonomi besar di

masa mendatang. Tanpa sistem akuntansi yang menghitung dan mengungkap konsekuensi tersebut, perusahaan tidak terdorong untuk membuat keputusan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Dalam konteks inilah akuntansi hijau, atau akuntansi lingkungan, menjadi penting untuk menghadirkan gambaran yang lebih menyeluruh, adil, dan bertanggung jawab tentang hubungan antara aktivitas bisnis, lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang (Maama & Appiah, 2019).

Akuntansi hijau muncul sebagai pendekatan yang memasukkan dampak lingkungan ke dalam sistem pencatatan dan pelaporan perusahaan (Nofita et al, 2024). Berbeda dari akuntansi tradisional yang hanya mencatat transaksi finansial, akuntansi hijau memasukkan faktor-faktor seperti emisi karbon, konsumsi energi, tingkat polusi, limbah yang dihasilkan, serta pemanfaatan sumber daya alam sebagai bagian dari pengukuran kinerja. Dengan integrasi ini, biaya-biaya yang sebelumnya tidak terlihat dapat dimasukkan dalam analisis bisnis, memungkinkan perusahaan mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial secara lebih objektif. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan finansial tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan lingkungan.

Agar akuntansi hijau dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan etika yang kuat sehingga proses pengukuran dan pelaporannya dilakukan secara jujur, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi hijau bukan sekadar aktivitas teknis mencatat dampak lingkungan, tetapi juga merupakan tindakan moral yang menunjukkan kesediaan perusahaan untuk mengungkapkan konsekuensi nyata dari kegiatan operasionalnya. Dalam sistem akuntansi tradisional yang cenderung mengabaikan eksternalitas lingkungan, celah untuk menutupi biaya lingkungan atau memberikan kesan seolah perusahaan telah bertanggung jawab sangatlah besar. Oleh karena itu, peran etika bisnis menjadi sangat penting. Etika memastikan bahwa

pelaporan lingkungan tidak hanya formalitas, tetapi dilakukan berdasarkan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Etika bisnis juga krusial karena informasi lingkungan sangat mudah dimanipulasi melalui pengurangan data, pemilihan indikator tertentu, atau penyajian informasi yang bias demi membentuk citra positif perusahaan. Tanpa etika yang kuat, akuntansi hijau dapat disalahgunakan sebagai sarana *greenwashing* yang menampilkan perusahaan seolah ramah lingkungan padahal tidak sesuai kenyataan operasional. Oleh karena itu, integrasi prinsip etika menjadi penentu agar akuntansi hijau benar-benar menjalankan fungsinya, dengan menunjukkan komitmen moral perusahaan untuk memelihara lingkungan (Roy et al, 2019). Dengan demikian, etika bisnis memberikan legitimasi moral dan sosial bagi akuntansi hijau yang memastikan bahwa praktiknya tidak hanya tepat secara teknis, namun juga benar secara nilai dan tanggung jawab publik.

Akuntansi hijau hanya dapat berjalan optimal apabila dilandasi komitmen etis pada keberlanjutan, akuntabilitas, dan keadilan. Perusahaan tidak cukup hanya menghitung dampak lingkungan, tetapi juga harus sungguh-sungguh berupaya mengurangi kerusakan ekologis, mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang merugikan masyarakat, serta menjaga kepentingan generasi masa depan. Tanpa nilai-nilai tersebut, akuntansi hijau akan berubah menjadi sekadar prosedur administratif yang tidak membawa perubahan nyata pada perilaku perusahaan.

Oleh sebab itu, etika bisnis memegang peranan penting mengingat informasi lingkungan sangat mudah disalahgunakan. Tidak seperti data keuangan yang lebih baku dan standar, informasi lingkungan cenderung kompleks, teknis, dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Hal ini memungkinkan perusahaan menutupi dampak negatif dengan mengurangi kedalaman data, memilih indikator yang

memberikan kesan “lebih hijau”, atau menyajikan informasi secara selektif untuk membangun citra keberlanjutan yang semu (Nguyen, 2023). Praktik-praktik tersebut mungkin tidak melanggar aturan teknis, tetapi tetap tidak etis dan menyesatkan publik. Oleh sebab itu, akuntansi hijau hanya mampu menjadi alat yang efektif dalam mendorong keberlanjutan apabila dijalankan dengan integritas dan prinsip etika bisnis yang kuat.

5.1 Konsep Akuntansi Hijau

Akuntansi hijau adalah pendekatan akuntansi yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses pengukuran, pencatatan, dan pelaporan kinerja organisasi. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada informasi finansial, tetapi juga memperhitungkan berbagai biaya dan manfaat ekologis seperti konsumsi energi, pengelolaan limbah, emisi karbon, konservasi sumber daya alam, serta dampak operasional terhadap lingkungan (Dunakhir et al, 2024). Dengan mengoptimalkan pencatatan biaya lingkungan yang sebelumnya dianggap eksternalitas, misalnya biaya pengolahan limbah, biaya emisi karbon, atau nilai ekonomis berkurangnya sumber daya, akuntansi hijau mampu menyajikan gambaran kinerja perusahaan yang lebih menyeluruh dan realistis. Melalui integrasi ini, perusahaan tidak lagi dapat terlihat berkinerja baik hanya dari besarnya laba, melainkan harus bertanggung jawab atas konsekuensi ekologis dari aktivitas bisnisnya.

Penerapan akuntansi hijau semakin penting seiring meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan transparansi atas dampak lingkungan. Melalui pelaporan seperti *environmental cost accounting*, *carbon accounting*, dan *sustainability reporting*, perusahaan dapat membuat keputusan strategis yang lebih bertanggung jawab serta memperkuat tata kelola

lingkungan. Selain itu, akuntansi hijau membantu organisasi memenuhi regulasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang lebih bijaksana. Dengan memahami biaya lingkungan secara lebih akurat, manajemen dapat mengambil keputusan yang benar-benar mencerminkan dampak nyata dari setiap aktivitas, bukan sekadar angka finansial.

5.2 Etika Bisnis dan Keberlanjutan

Etika bisnis menjadi dasar utama dalam penerapan akuntansi hijau karena proses pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan sangat mudah diselewengkan. Data lingkungan dapat dibuat tampak lebih baik melalui pemilihan indikator yang menguntungkan, pengurangan informasi yang merugikan citra perusahaan, atau penyajian laporan yang hanya menonjolkan sisi positif. Tanpa nilai kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi, akuntansi hijau berisiko berubah menjadi praktik *greenwashing* sekadar upaya memoles untuk menampilkan perusahaan seolah peduli lingkungan meskipun operasionalnya tetap merusak (Rahman & Islam, 2023).

Penerapan akuntansi hijau tidak cukup hanya bergantung pada sistem pencatatan dan pelaporan, tetapi memerlukan integritas etis dalam setiap tahapnya. Data lingkungan seperti emisi, limbah, atau konsumsi energi sangat mudah dimanipulasi karena sifatnya teknis dan sulit diverifikasi publik. Tanpa etika bisnis, perusahaan dapat melakukan berbagai bentuk rekayasa pelaporan agar tampak lebih ramah lingkungan, misalnya memilih indikator yang menguntungkan, mengurangi informasi negatif, atau menyusun narasi yang memberi kesan kinerja baik. Praktik seperti ini merupakan bentuk *greenwashing* (Ajibola & Tejumola, 2023). Oleh sebab itu, etika bisnis menjadi fondasi agar akuntansi hijau benar-benar menggambarkan kondisi

lingkungan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar alat pencitraan. Dalam praktiknya, perusahaan dapat melibatkan auditor lingkungan independen untuk memverifikasi data atau secara terbuka mengakui ketidakberhasilan mencapai target, sekaligus menjelaskan penyebab dan rencana perbaikannya.

Keberlanjutan menuntut perusahaan untuk memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menjalankan usahanya. Di sinilah etika bisnis memainkan peran strategis: memastikan bahwa keputusan perusahaan tidak hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap generasi mendatang. Etika bisnis mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak-hak masyarakat serta ekosistem yang terkena dampak aktivitas perusahaan. konsep keberlanjutan (*sustainability*) mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya.

Etika bisnis berperan besar dalam memastikan keseimbangan ini tercapai. Tanpa etika, perusahaan cenderung mengambil keputusan yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, misalnya memotong biaya dengan cara merusak lingkungan, mengeksploitasi tenaga kerja, atau mengabaikan dampak sosial. Dengan etika bisnis, perusahaan diarahkan untuk bertindak adil, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap generasi mendatang dan ekosistem. Dengan kata lain, etika bisnis memastikan bahwa keberlanjutan bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan perusahaan, misal dengan mengganti bahan kimia berbahaya dalam produk pembersih wajah dengan bahan yang lebih aman. Perusahaan melakukan riset bahan pengganti seperti enzim ramah lingkungan. Hal ini

tentunya butuh investasi besar dalam riset, dan uji keamanan produk. Meskipun biaya produksi meningkat, tetapi perusahaan tetap menjalankan kebijakan ini untuk mengurangi polusi air dan mikroplastik. Hasilnya, produk menjadi lebih aman bagi konsumen dan lingkungan, serta memperkuat reputasi keberlanjutan perusahaan.

Etika bisnis memastikan bahwa akuntansi hijau tidak sekadar menjadi proses teknis, tetapi dijalankan dengan prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab atas dampak ekologis maupun sosial. Dengan landasan etis, perusahaan akan menyajikan pelaporan lingkungan secara lebih terbuka dan terhindar dari praktik *greenwashing* (Schaltegger & Burritt, 2017). Komitmen ini mendorong tercapainya tujuan keberlanjutan, karena perusahaan tidak hanya memenuhi persyaratan minimum, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang. Ketika etika bisnis berpadu dengan prinsip keberlanjutan, akuntansi hijau dapat berfungsi maksimal sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan yang berorientasi masa depan. Laporan yang dihasilkan pun tidak hanya mencerminkan kondisi finansial, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengelola sumber daya, menekan jejak lingkungan, serta melindungi kepentingan publik, sehingga pada akhirnya memperkuat legitimasi sosial dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

5.3 Integrasi Akuntansi Hijau dan Etika

Integrasi akuntansi hijau dengan prinsip etika merupakan aspek penting dalam membangun praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Akuntansi hijau memang menyediakan alat teknis untuk menilai, mencatat, dan melaporkan dampak lingkungan, tetapi tanpa dukungan nilai-nilai etis, proses tersebut sangat rentan dimanipulasi

demikian membentuk citra positif perusahaan. Data terkait emisi, limbah, konsumsi energi, atau upaya pelestarian sumber daya bisa saja dipilih secara selektif, disembunyikan, atau disajikan secara bias untuk menghasilkan gambaran yang lebih menguntungkan daripada kondisi sebenarnya.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan kelapa sawit di Indonesia pernah mendapatkan kritik karena laporan keberlanjutannya hanya menonjolkan keberhasilan program konservasi dan penggunaan energi terbarukan, tetapi tidak mengungkapkan secara lengkap temuan mengenai pencemaran sungai akibat limbah pabrik yang diberitakan oleh masyarakat dan lembaga lingkungan. Dalam laporan resminya, perusahaan menampilkan grafik penurunan emisi dan peningkatan efisiensi energi, namun mengabaikan data mengenai tingginya volume limbah cair yang melebihi baku mutu di beberapa unit operasional. Bahkan, penurunan angka emisi yang diklaim ternyata lebih disebabkan oleh penurunan produksi, bukan inovasi pengelolaan lingkungan. Jika etika bisnis diterapkan secara konsisten, perusahaan seharusnya melaporkan data secara menyeluruh, baik yang positif maupun negatif dan melibatkan audit lingkungan independen, serta menjelaskan langkah korektif yang dilakukan. Contoh ini menunjukkan bahwa tanpa integritas etis, akuntansi hijau tidak lebih dari strategi pencitraan, bukan alat akuntabilitas lingkungan. Di sinilah nilai-nilai etis seperti kejujuran, transparansi, dan integritas memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data lingkungan yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi sesungguhnya (Syarkani, 2025). Etika bisnis membantu mengarahkan akuntansi hijau agar tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga instrumen untuk mempertanggungjawabkan dampak ekologis dan sosial dari aktivitas perusahaan. Dengan menjadikan etika sebagai landasan, perusahaan akan terdorong melakukan pengukuran lingkungan secara menyeluruh, memakai indikator yang tepat, dan mengungkapkan informasi baik yang

menguntungkan maupun yang merugikan. Pendekatan ini meningkatkan keandalan laporan dan membantu regulator, masyarakat, serta investor menilai komitmen keberlanjutan perusahaan secara objektif.

Lebih lanjut, ketika akuntansi hijau terintegrasi dengan nilai etis, maka laporan lingkungan dapat berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan jangka panjang. Laporan tersebut tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan, tetapi juga menunjukkan keseriusan perusahaan mengelola sumber daya, menekan dampak ekologis, dan melindungi kepentingan publik. Integrasi ini mendukung pemenuhan regulasi, menjaga legitimasi sosial, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan memberikan arah yang jelas bagi transformasi bisnis berkelanjutan.

5.4 Penerapan Akuntansi Hijau

Penerapan akuntansi hijau yang berlandaskan etika menuntut perusahaan tidak hanya memakai alat ukur atau format pelaporan lingkungan, tetapi juga menjalankannya dengan kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab. Praktiknya mencakup pengumpulan data lingkungan yang tepat, pemilihan indikator yang sesuai, serta pelaporan yang terbuka tanpa menyembunyikan dampak negative (Stefani, 2024). Contohnya, dalam menghitung emisi karbon, perusahaan harus menggunakan standar terbaik yang bukan hanya memilih metode yang menghasilkan nilai terendah demi memperbaiki citra. Nilai etis memastikan bahwa data yang diungkapkan benar-benar menggambarkan realitas operasional, bukan hasil rekayasa.

Penerapan akuntansi hijau yang beretika juga tampak dari bagaimana perusahaan menggunakan hasil pengukuran dampak lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan tidak hanya dijadikan laporan formal untuk memenuhi kewajiban regulasi, tetapi menjadi acuan

untuk melakukan perbaikan nyata seperti meningkatkan efisiensi energi, mengganti bahan berisiko, atau berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi memahami tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, etika menjadi penuntun yang menjadikan akuntansi hijau berfungsi sebagai alat transformasi, bukan sekadar dokumentasi.

Dalam penerapannya yang lebih luas, perusahaan juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar proses pelaporan lingkungan berlangsung secara transparan dan bertanggung jawab. Keterlibatan ini dapat berupa dialog dengan masyarakat, audit lingkungan oleh pihak independen, atau penerbitan laporan keberlanjutan yang terbuka untuk diuji dan dikritisi. Mekanisme partisipatif seperti ini mendorong perusahaan menjaga keakuratan informasi serta menjauh dari praktik *greenwashing* (Castelblanco et al, 2023). Pada akhirnya, akuntansi hijau yang berlandaskan etika memperkuat legitimasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, dan memastikan bahwa prinsip keberlanjutan benar-benar tertanam dalam strategi bisnis jangka panjang.

Penerapan akuntansi hijau yang berlandaskan etika bisnis kini semakin umum dilakukan oleh perusahaan yang menyadari bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar urusan citra, tetapi juga kewajiban moral dan strategi penting bagi keberlanjutan usaha. PT Unilever Indonesia menjadi salah satu contoh nyata, dengan mengintegrasikan biaya serta dampak lingkungan ke dalam sistem akuntansinya. Mereka tidak hanya mengukur konsumsi energi, air, dan emisi karbon, tetapi juga memperlakukannya sebagai komponen biaya operasional yang harus dikelola. Komitmen etis perusahaan tampak dari keterbukaannya melaporkan baik keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target lingkungan dalam

laporan keberlanjutan. Pendekatan ini membantu mencegah greenwashing dan menunjukkan bahwa akuntansi hijau yang dijalankan benar-benar didasari prinsip akuntabilitas.

Demikian juga perusahaan otomotif seperti *Toyota Motor Corporation* juga mengimplementasikan akuntansi hijau dengan menghitung berbagai biaya lingkungan, mulai dari penggunaan energi, air, produksi limbah, hingga tingkat kebisingan pabrik. Seluruh pelaporan dilakukan sesuai standar internasional seperti ISO 14001, sehingga data yang disampaikan dapat diverifikasi secara independen. Komitmen etis Toyota terlihat dari keterbukaannya mengungkapkan peningkatan emisi di beberapa fasilitas, bukan menutupi informasi demi menjaga reputasi. Transparansi ini menunjukkan bahwa akuntansi hijau dijalankan dengan integritas, bukan sekadar alat pemasaran. Secara keseluruhan, contoh tersebut menegaskan bahwa akuntansi hijau berbasis etika tidak hanya berfokus pada perhitungan dampak lingkungan, tetapi juga pada komitmen moral untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan transparan kepada masyarakat. Ketika prinsip etika diintegrasikan, perusahaan bukan hanya mematuhi aturan, tetapi juga memperkuat kepercayaan *stakeholder* serta menopang keberlanjutan jangka panjang.

5.5 Pelaporan Keberlanjutan

Berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial menjadikan laporan keberlanjutan sebagai kebutuhan strategis bagi perusahaan. Laporan ini tidak hanya memuat aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga menggambarkan tingkat tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan operasinya. Pada titik ini, akuntansi hijau yang berlandaskan etika bisnis menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi

nyata, bukan sekadar alat promosi. Dengan pendekatan tersebut, pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas yang menegaskan komitmen moral perusahaan terhadap keberlanjutan jangka panjang (Gibassier, 2025).

Keterkaitan antara pelaporan keberlanjutan dan akuntansi hijau berbasis etika terlihat dari cara perusahaan menilai, menghitung, dan menyampaikan dampak lingkungan maupun sosial dari aktivitasnya. Akuntansi hijau menyediakan instrumen untuk mengukur penggunaan energi, emisi, limbah, dan efisiensi sumber daya, sedangkan etika bisnis memastikan seluruh proses dilakukan dengan jujur, terbuka, dan bebas manipulasi. Jika keduanya berjalan selaras, laporan keberlanjutan tidak sekadar menjadi kewajiban formal, tetapi mencerminkan nilai-nilai moral yang membimbing perusahaan dalam menentukan arah dan keputusan strategisnya.

Ke depan, perusahaan yang mampu mengintegrasikan pelaporan keberlanjutan dengan akuntansi hijau berlandaskan etika akan memiliki posisi yang lebih unggul karena lebih transparan, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab dalam mengelola dampak lingkungan maupun sosial. Kolaborasi ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga disajikan dengan kejujuran tanpa rekayasa, sehingga memperkuat kepercayaan investor, regulator, dan publik terhadap komitmen keberlanjutan perusahaan. Menurut Rehman, et al (2020), di tengah meningkatnya tuntutan standar global seperti *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, *Global Reporting Initiative (GRI)*, *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, *International Sustainability Standards Board (ISSB)* dan aturan emisi, perusahaan yang menjunjung etika akan lebih mudah memenuhi kewajiban pelaporan, mengurangi risiko reputasi, serta memperoleh peluang pendanaan yang lebih besar.

Dengan demikian, perpaduan antara etika, akuntansi hijau, dan pelaporan keberlanjutan menjadi nilai strategis yang meningkatkan daya saing di level internasional.

Sinergi antara pelaporan keberlanjutan, akuntansi hijau, dan prinsip etika membuat perusahaan mampu menyajikan informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga jujur dan bebas dari manipulasi. Dalam konteks ini, laporan yang dibuat secara jujur dan berdasarkan metode pengukuran yang tepat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat reputasi perusahaan, dan membuka akses yang lebih luas terhadap investasi berkelanjutan. Dengan keandalan data yang terjaga, pelaporan keberlanjutan pun bertransformasi dari sekadar alat komunikasi menjadi pilar tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

5.6 Tantangan dan Masa Depan

Penerapan akuntansi hijau yang berlandaskan etika bisnis masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan data lingkungan yang akurat, keberagaman standar pelaporan, serta resistensi internal dalam perusahaan. Banyak organisasi kesulitan memperoleh data yang reliabel karena minimnya teknologi pengukuran, kapasitas sumber daya manusia, atau sistem lingkungan yang belum terintegrasi. Perbedaan standar seperti GRI, SASB, dan ISSB juga membuat perusahaan cenderung memilih pedoman yang paling menguntungkan bagi citra mereka, sehingga membuka peluang terjadinya pelaporan lingkungan yang bias jika tidak ditopang komitmen etis. Dari sisi etika, tantangan muncul ketika budaya perusahaan masih menitikberatkan keuntungan jangka pendek, sehingga manajemen enggan mengungkapkan dampak lingkungan secara apa adanya karena takut memengaruhi reputasi atau nilai perusahaan. Tanpa perubahan nilai dan cara pandang yang menempatkan

kejujuran dan keberlanjutan sebagai prinsip utama, akuntansi hijau berisiko hanya menjadi formalitas atau alat *greenwashing*, bukan praktek yang benar-benar mencerminkan tanggung jawab lingkungan.

Meski menghadapi tantangan, masa depan akuntansi hijau berbasis etika bisnis memiliki prospek yang semakin kuat seiring meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim, regulasi yang semakin ketat, dan tekanan dari investor serta konsumen (Rasyid, et al, 2025). Pemerintah di berbagai negara mulai mewajibkan pelaporan keberlanjutan, sementara lembaga keuangan mengintegrasikan risiko iklim dalam proses penilaian kredit dan investasi. Perkembangan teknologi seperti *big data analytics*, dan kecerdasan buatan juga akan mempermudah pengumpulan data lingkungan secara *real-time*, meningkatkan akurasi pelaporan, dan mengurangi peluang manipulasi.

Ke depan, akuntansi hijau berbasis etika bisnis tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga komponen strategis dalam manajemen risiko, inovasi bisnis, dan penciptaan nilai jangka panjang. Perusahaan yang mengintegrasikan etika dalam setiap tahap pengukuran dan pelaporan lingkungan akan memiliki keunggulan kompetitif karena dianggap lebih terpercaya dan berorientasi pada keberlanjutan. Akuntansi hijau akan berkembang menjadi sistem informasi yang memandu perusahaan dalam membuat keputusan investasi, merancang proses produksi, dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Dengan komitmen etis yang kuat, masa depan akuntansi hijau tidak hanya menjawab tuntutan lingkungan saat ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi bisnis yang lebih bertanggung jawab bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, T. J., & Sumarna, A. D. (2025). Investigating the effect of green accounting adoption and sustainability disclosure in Indonesian manufacturing companies. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 10(1), 106–113. <https://doi.org/10.30871/jaat.v10i1.9095>.
- Ajibola, A. M., & Tejumola, A. A. (2023). Green accounting and environmental sustainability practices among Nigerian listed companies. *African Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 12(2), 143–159. <https://doi.org/10.1504/AJAAF.2023.130841>.
- Alaika, A. A., & Firmansyah, A. (2024). Unveiling the impact of green accounting and sustainability disclosure on firm value: Evidence from the Indonesian palm oil industry. *Journal of Governance, Risk Management, Compliance and Sustainability*, 4(2), 45–61. <https://doi.org/10.31098/jgrcs.v4i2.2436>.
- Bebbington, J., Larrinaga, C., O'Dwyer, B., & Thomson, I. (eds.). (2020). *Routledge Handbook of Environmental Accounting*. Routledge, London. ISBN 9780367152369. <https://doi.org/10.4324/9780367152369>
- Castelblanco, G., Guevara, J., Rojas, D., Correa, J., & Verhoest, K. (2023). Environmental Impact Assessment Effectiveness in Public–Private Partnerships: Study on the Colombian Toll Road Program. *Journal of Management in Engineering*, 39(2). <https://doi.org/10.1061/JMENEA.MEENG-5015>
- Dunakhir, S., Idrus, M., & Afiah, N. (2024). The implementation of green accounting in Indonesia: A case study of SOEs. *Journal of Social Science and Business Studies*, 2(4), 294–302. <https://doi.org/10.61487/jssbs.v2i4.106>

- Gibassier, D. (2025). *Accounting for Social and Environmental Sustainability*. Routledge, London. ISBN 9781032883939.
- Khomsiyah, Gunawan, J., & Nilawati, Y. J. (2023). Green Accounting, Environmental Accounting, and Sustainability: A Current and Future Opportunity. *AFRE: Accounting and Financial Review*, 6(2), 202–211. <https://doi.org/10.26905/afr.v6i2.10554>.
- Maama, H., & Appiah, K. O. (2019). Green accounting practices: lesson from an emerging economy. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(4), 456–478. <https://doi.org/10.1108/QRFM-02-2017-0013>
- Nguyen, T. T. (2023). Challenges in green accounting: Sustainable development for companies listed on the Vietnam stock exchange. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 10(12), 56–65. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2023.12.007>.
- Nofita, R., Siskawati, E., Andriani, W., Ansar, M. (2024). *Green Accounting and Organization Performance: Science Mapping of Present and Future Trends*. *JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance*, 7 (1), 62-81. <https://doi.org/10.33005/jasf.v7i1.475>
- Rahman, M. M., & Islam, M. E. (2023). *The impact of green accounting on environmental performance: mediating effects of energy efficiency*. *Environmental Science & Pollution Research (regional study)*. *Environmental Scienvce and Pollution Research*, 30 (26), <https://doi.org/10.1007/s11356-023-27356-9>
- Rasyid, S., Azis, N. A., & Rahmat, A. (2025). *Green accounting for medium-sized enterprises: participatory action research toward a sustainable model*. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15 (1), 84-92. <https://doi.org/10.32479/ijefi.17331>

- Rehman, S. U., Bhatti, A., Kraus, S., & Ferreira, J. J. M. (2020). The role of environmental management control systems for ecological sustainability and sustainable performance. *Management Decision*, 59(9), 2217–2237. <https://doi.org/10.1108/MD-06-2020-0800>
- Roy, A., Moulik, S., Kamesh, R., Mullick, A. 2019. *Ethics and Sustainability in Accounting and Finance*. Sringer, New York. ISBN 978-9811332029.
- Schaltegger, S., & Burritt, R. (2017). *Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts and Practice*. Routledge, London. ISBN 9781351282529. <https://doi.org/10.4324/9781351282529>
- Stefani, J. G. (2024). *How Green Accounting, Carbon Emission Disclosure and Leadership affect firm value: evidence from Indonesia (2018–2023)*. IRJEMS: International Research Journal of Economics and Management Studies, 3 (12), 185-195. <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I12P122>.
- Syarkani, Y. (2025). *Green Accounting Implementation and Its Influence on Corporate Environmental Responsibility Disclosure in Indonesia Public Companies*. ENDLESS: International Journal of Future Studies, 8 (2), 31-48. <https://doi.org/10.54783/endllessjournal.v8i2.346>.

INDEKS

A

Akuntansi Hijau (Green Accounting), ii, 1, 9, 10, 11
Akuntansi Lingkungan, 70, 97
Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (APS), 7, 11
Audit Lingkungan, iv, 87

B

Best Practices, v, 95, 98
Bottom-Up Approach, iv, 89

C

Carbon Accounting, iii, 37, 94, 99

E

Efisiensi Biaya, iii, 59, 67
ESG (Environmental, Social, Governance), iii, 78
Etika Bisnis, v, 106
Evolusi Akuntansi Hijau, ii, 7

G

Global Reporting Initiative (GRI), 7, 75, 93, 98, 113
Green Accounting Policy Framework, iv, 85

I

IFRS Sustainability Disclosure Standards, 8, 24, 72, 76
Indikator Kinerja Lingkungan (Environmental Performance Indicators), ii, 24
Inovasi Bisnis, iii, 65
Integrated Reporting, 7, 76, 96

K

Kinerja Keuangan, iii, 13, 43, 44, 58

Komitmen Manajemen, iv, 84

L

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), ii, 27

Liabilitas Lingkungan, ii, 22

Life Cycle Costing (LCC), ii, 33, 63

Lingkungan Makro, ii, vi, 3, 4

Lingkungan Mikro, ii, 6

M

Material Flow Cost Accounting (MFCA), ii, 34

P

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), 7

Pengungkapan Lingkungan, ii, 13, 23

Profitabilitas, iii, 47, 59

R

Rantai Nilai, iv, 86

Risiko Keuangan, iii, 60

S

SDGs (Sustainable Development Goals), iii, 78

Sistem Akuntansi Nasional (SAN), 3

T

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory), 10

Teori Sinyal (Signaling Theory), 11

Top-Down Approach, iv, 88

Triple Bottom Line (TBL), 7, 11, 82

Triple Helix, iv, 88, 90

GLOSARIUM

Akuntansi Hijau (*Green Accounting*): Disiplin akuntansi yang secara sistematis mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan melaporkan biaya serta manfaat lingkungan yang relevan dari kegiatan perusahaan.

Akuntansi Hijau Lingkungan Makro: Penerapan akuntansi hijau pada tingkat negara atau regional yang mengintegrasikan data lingkungan ke dalam Sistem Akuntansi Nasional (SAN), seperti Produk Domestik Bruto (PDB) Hijau.

Akuntansi Hijau Lingkungan Mikro: Penerapan konsep dan prosedur akuntansi hijau pada tingkat entitas bisnis individual untuk mengelola biaya dan kinerja lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan.

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (APS): Akar perkembangan akuntansi hijau pada tahun 1970-an yang mengintegrasikan isu sosial dan lingkungan ke dalam pelaporan korporat.

Aset Lingkungan: Sumber daya yang dikelola oleh perusahaan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi terkait dengan pelestarian lingkungan.

Biaya Lingkungan (*Environmental Cost*): Biaya yang timbul akibat aktivitas operasional perusahaan yang berdampak pada lingkungan, termasuk biaya pengolahan limbah dan investasi peralatan ramah lingkungan.

Eksternalitas Negatif: Dampak merugikan (seperti polusi atau limbah) yang dihasilkan oleh kegiatan operasional perusahaan namun sering kali tidak tercermin dalam model akuntansi tradisional.

ESG (*Environmental, Social, Governance*): Kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan dan dampak etis dari investasi di perusahaan.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*): Laporan yang mengungkapkan informasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial sebuah organisasi kepada pemangku kepentingan.

Liabilitas Lingkungan: Kewajiban finansial yang mungkin timbul di masa depan akibat dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan saat ini.

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*): Konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

SDGs (*Sustainable Development Goals*): Agenda global yang berisi serangkaian tujuan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua.

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*): Teori yang menyatakan bahwa perusahaan harus memastikan operasinya dianggap sah oleh masyarakat sesuai dengan "kontrak sosial" melalui pengungkapan informasi lingkungan yang transparan.

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*): Pandangan bahwa keberhasilan perusahaan bergantung pada kemampuannya mengelola hubungan dengan semua pihak yang berkepentingan, termasuk lingkungan dan masyarakat.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*): Penggunaan pengungkapan akuntansi hijau oleh perusahaan

berkinerja baik untuk memberikan sinyal positif kepada pasar guna mengurangi asimetri informasi.

Triple Bottom Line (TBL): Konsep pelaporan kinerja yang mencakup tiga pilar utama: *People* (sosial), *Planet* (lingkungan), dan *Profit* (ekonomi).

BIODATA PENULIS



Arnadi Chairunnas, SE., M.Acc., Ak., CA., AFA.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis lahir di Ujung Pandang, tanggal 11 Januari 1991. Penulis adalah dosen tetap PNS pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu EKonomi (FISIE), Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi, Universitas Halu Oleo dan melanjutkan S2 dan Profesi Akuntan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen dan juga praktisi di bidang akuntansi dan audit.

BIODATA PENULIS



Aina Zahra Parinduri, SE, MM

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Penulis lahir di Jakarta, November 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Manajemen dan sedang berjalan menempuh S3 Akuntansi. Penulis menekuni bidang Menulis, Akuntansi manajemen, strategik dan pengendalian kinerja, manajemen keuangan dan analisa laporan keuangan.

BIODATA PENULIS



Dr. Fenny Marietza, SE., M.Ak

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bengkulu

Penulis lahir di Jakarta tanggal 01 april 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi, setelah itu melanjutkan S3 pada Jurusan Manajemen Keuangan (Finance).

Penulis adalah dosen tetap di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu sejak tahun 2009 hingga saat ini. Penulis saat ini menjabat sebagai ketua jurusan akuntansi FEB UNIB. Selain itu, penulis aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat dengan minat khusus pada isu-isu akuntansi lingkungan, audit investigatif, tata kelola perusahaan, dan pembiayaan berkelanjutan. Penulis telah menghasilkan beberapa buku yang diantaranya adalah mengenai akuntansi keberlanjutan, auditing, manajemen risiko dll. Penulis juga

terlibat dalam berbagai proyek penelitian dan kerjasama akademik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Karya ilmiahnya banyak berkontribusi pada bidang keuangan terutama CSR, ESG dan SDGs. Melalui buku ini, Penulis berharap dapat memberikan kontribusi intelektual yang relevan bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam memahami akuntansi hijau.

BIODATA PENULIS



Stefani Lily Indarto, SE., MM., AK., CA., CPA., ASEAN CPA

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik
Soegijapranata

Penulis lahir di Yogyakarta, 13 Mei 1974. Penulis menyelesaikan S1 Akuntansi pada tahun 1996 di STIE YKPN Yogyakarta, Magister Manajemen (S2) pada tahun 1997. Penulis aktif mengajar di Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata sejak tahun 1998 sebagai dosen tetap pada Program Studi Akuntansi. Fokus penelitian yang dilakukan adalah dalam bidang *Risk Based Audit*, *Fraud Risk* dan *Good Governance*.

Penulis juga aktif sebagai Chief Editor Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan (JEMAP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, dan reviewer di beberapa dan saat ini sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unika Soegijapranata. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain eneliti, penulis juga telah menghasilkan karya ilmiah baik jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, dan menghasilkan beberapa buku ajar,

serta aktif menulis artikel dalam beberapa *Bookchapter*. Selain seorang akademisi, penulis juga berpraktek di Kantor Akuntan Publik (KAP) dan aktif di beberapa organisasi profesi.